



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT RAPAT KERJA  
KOMISI V DPR RI  
DENGAN  
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : V  
Rapat Ke- : 7  
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023  
Waktu : Pukul 10.10--15.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI - Jakarta  
Acara : 1. Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2023 sampai bulan Mei 2023;  
2. Membahas hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2022;  
3. Pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2024;  
4. Lain-lain.
- Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae (F-P. Golkar) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI  
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Pimpinan  
1. Ir. Ridwan Bae (F-PG)  
2. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. (F-PG)  
3. Robert Rouw (F-Nasdem)  
4. H. Muhammad Iqbal, SE., M. Com. (F-PPP)
- B. Anggota  
1) FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)  
5. Ir. Sudjadi  
6. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.  
7. Harvey B. Malaihollo  
8. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.

- 2) FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
  9. Cen Sui Lan
  10. Dr. H. Ali Mufthi, S.AG., M. Si.
  11. Ilham Pangestu
  12. Muhammad Fauzi, S.E.
  13. Ir. H. Anang Susanto, M.Si.
  
- 3) FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)
  14. Ir. Sumail Abdullah
  15. Sudewo, S.T., M.T.
  16. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.
  17. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
  18. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
  
- 4) FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
  19. Drs. H. Tamanuri, M.M.
  20. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
  21. Drs. H. Soehartono, M.Si.
  22. Drs. Fadholi, M. Ikom.
  23. Sri Wahyuni
  
- 5) FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
  24. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
  25. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
  
- 6) FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
  26. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
  27. Willem Wandik
  28. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
  29. Lasmi Indaryani, S.E.
  
- 7) FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
  30. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
  31. Ir. H. Sigit Sosiantomo
  32. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
  33. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.
  
- 8) FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
  34. H. Boyman Harun, S.H.
  35. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
  
- 9) FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
  36. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

la

- IZIN :
1. Lasarus, S.Sos., M.Si. (Ketua Komisi V DPR RI/F-PDI Perjuangan)
  2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H. (F-PDI Perjuangan)
  3. Mochamad Herviano (F-PDI Perjuangan)
  4. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA. (F-PDI Perjuangan)
  5. Ir. Effendi Sianipar (F-PDI Perjuangan)
  6. Drs. Hamka B. Kady, M.S. (F-PG)
  7. H. An'im Falachudin Mahrus (F-PKB)

- UNDANGAN:
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Dr. Ir. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc.);
  2. Jajaran Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

la

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,  
Yang terhormat Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
beserta jajarannya, serta  
Hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Menurut laporan dari Sekretariat, daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 18 orang dan terdiri dari 7 fraksi sehingga telah memenuhi kuorum.

Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah saya membuka rapat kerja pada hari ini. Dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.10 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Pak Menteri PUPR beserta jajaran yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini untuk hadir membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, Hasil pemeriksaan BPK RI Semester I dan tahun 2022 dan Pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 dan lain-lain.

Sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Badan Anggaran DPR RI, setiap komisi dialokasikan waktu untuk membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan RKP Tahun Anggaran 2024 bersama dengan kementerian atau lembaga mitra kerja yang hasil pembahasannya akan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi tanggal 9 Juni 2023.

Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa realisasi anggaran Kementerian PUPR per 4 Juni 2023 adalah sebesar 22,70%. Untuk itu, pada kesempatan rapat kerja ini, kami perlu mendapatkan penjelasan dari Menteri

PUPR tentang upaya-upaya yang harus dilakukan agar penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Selanjutnya, terkait dengan agenda pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2022, kami memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saya pikir ini adalah mohon ditepuktangani oleh Pak Menteri karena Wajar Tanpa Pengecualian. Namun demikian, dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PUPR masih terdapat 32 temuan dan 101 rekomendasi.

Salah satu pokok temuan tersebut antara lain terkait permasalahan pelaksanaan pekerjaan fisik belanja barang maupun belanja modal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya permasalahan pada beberapa Satker Kementerian PUPR selama Tahun Anggaran 2021 terkait kesalahan, ketidaktepatan perhitungan harga satuan, kekurangan volume fisik pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan maupun kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang seharusnya merupakan kewajiban dari penyedia.

Temuan terbesar dalam hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 yaitu penatausahaan aset tetap renovasi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian PUPR sebelum...belum sepenuhnya memadai dimana terdapat resiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan resiko duplikasi pencatatan aset oleh entitas lain atas aset sebesar 1,467 triliun. Disamping itu, masih terdapat temuan berulang dari tahun sebelumnya yaitu kesalahan penganggaran belanja barang sebesar 77,12 miliar, kesalahan penganggaran belanja modal sebesar 404,67 miliar dan kesalahan pengklarifikasian belanja modal sebesar 3,049 miliar.

Selanjutnya, terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024, pemerintah telah menyampaikan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 dengan tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dimana pagu indikatif Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024 sebesar 128,15 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional di bidang PUPR melalui pelaksanaan program, infrastruktur konektivitas pendidikan dan pelatihan vokasi serta program dukungan manajemen.

Pada kesempatan ini pula, kami ingin menyampaikan beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dari Kementerian PUPR antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai tema RKP tahun 2024, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar belanja Kementerian tahun 2024 diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan layanan dan

kesejahteraan masyarakat serta konektivitas antar kawasan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;

2. Perlu percepatan pencapaian target Renstra Kementerian PUPR tahun 2020 sampai 2024 antara lain:

- Memperluas cakupan pasokan air baku;
- Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antara pusat-pusat pertumbuhan;
- Memperkecil *backlog* perumahan; serta
- Program pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

3. Perlu untuk selalu meningkatkan pengawasan *audit* dan *review* terutama terhadap pelaksanaan prosedur tender dalam mewujudkan proses lelang yang transparan dan akuntabel;

4. Dalam program atau kegiatan Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024 agar memastikan Proyek Strategis Nasional yang direncanakan selesai pada tahun 2024 harus benar-benar dituntaskan;

5. Diperlukan percepatan pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar maupun konektivitas pada pembangunan Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Nusantara.

Oleh karena itu, kami harapkan agar dalam proses penyusunan pagu indikatif belanja kementerian atau lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam seluruh rangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Menteri PUPR untuk menyampaikan penjelasannya mengenai evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, Hasil pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2022 dan Pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu kepada Pak Menteri kami persilakan.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom.*

Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat juga dan kami hormati,

Sesuai dengan undangan dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi Pimpinan siding, izinkan kami melaporkan tiga hal tadi, evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2023 sampai dengan bulan Mei 2023. Kelihatannya suaranya lebih baik untuk nyanyi ini ya, halo, halo, *sound systemnya* bagus.

Yang kedua, Pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2022. Jadi evaluasi tadi pada halaman 4 sampai 15 pada buku yang telah kami sampaikan. Pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2022 halaman 16 sampai 28. Dan pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 halaman 29 sampai dengan 45. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, kami catat dengan baik khususnya untuk 5 isu penyusunan RKP tahun 2024 tadi, pemerataan, pencapaian renstra, pengawasan pengadaan barang dan jasa, penyelesaian proyek strategis nasional dan pembangunan *basic infrastructure* di IKN.

Ibu-Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati,

Yang pertama, kami ingin melaporkan evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2023 sampai bulan Mei 2023. Pagu awal Kementerian PUPR tahun 2023 adalah sebesar 125,22 triliun dan mengalami penambahan sebesar 15,7 triliun sehingga pagu akhirnya menjadi 140,92 triliun.

Rinciannya adalah sebagai berikut, tentang penambahan 15,7 triliun tadi yaitu adalah:

1. Luncuran SBSN tahun 2022 sebesar 2,08 triliun, antara lain untuk pembangunan DI Slinga, peningkatan daerah irigasi air Manjuntolo, pembangunan jalan dan jembatan;

2. Percepatan pinjaman dan hutang luar negeri sebesar 6,84 triliun, antara lain untuk:

a. *Integrated Participatory Development and Management Irrigation (IPDMIP)* untuk rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi;

b. *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)* ini juga untuk rehabilitasi untuk irigasi; kemudian

c. *Emergency assistance for rehabilitation and reconstruction*, ini adalah untuk bencana alam terutama di Sulawesi Tengah;

d. *Indonesia tourism development project*, ini untuk lima destinasi wisata prioritas;

e. *National urban water supply project*, ini untuk air minum;

f. *National affordable housing program*, ini yang Bapak-Bapak gunakan untuk apa...apa namanya, rumah perbaikan rumah tidak layak huni.

3. Tambahan 15,7 triliun tadi juga termasuk tambahan rupiah murni dari bencana alam sebesar 6,78 triliun untuk penanganan bencana alam di Kota Palu, Sulteng, di Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Cianjur Jawa Barat sebesar 0,16 triliun. Dan penataan ASEAN *summit* di Labuan Bajo, renovasi sarana dan prasarana olahraga serta dukungan di kawasan industri terpadu Batang sebesar 0,7 triliun serta pembangunan IKN sebesar 5,61 triliun.

Realisasi anggaran per 4 Juni seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, sebesar 31,98 triliun atau 22,70% dari total anggaran dengan progres fisik sebesar 24,9%. Lebih tinggi dari realisasi keuangan tahun 2022, anggarannya waktu itu adalah 125 triliun sebesar 19,21 triliun. Jadi pada saat yang sama, untuk ini hanya membandingkan saja, kinerja 2023 lebih cepat sedikit daripada 2022 walaupun anggarannya jauh lebih besar.

Yang ketiga, jumlah paket lelang tahun 2023 adalah sebesar 4.035 paket pekerjaan senilai 94,76 triliun yang progres lelangnya sampai dengan 4 Juni ini adalah, paket terkontrak sebanyak 2.808 paket dengan pagu 76,44 triliun atau 80,66% dari total kegiatan kontraktual yang 94,76 triliun tadi, yaitu meliputi paket tender baru baik yang *single years* maupun yang *multi-years* yang harus diselesaikan tahun depan sebanyak 1.616 paket, dengan pagu 20,03 triliun. Dan melanjutkan paket *multiyears* yang dilaksanakan tahun lalu yang telah terkontrak pada tahun anggaran sebelumnya sebanyak 1.169 paket dengan pagu 56,13 triliun. Saat ini sebanyak 1.227 paket dengan pagu 18,32 triliun sedang dalam proses lelang, kami rencanakan secepat mungkin pada bulan Juni sudah dapat kita selesaikan.

Yang keempat, dukungan infrastruktur IKN tahun 2020 sampai 2023 sebesar 36,72 triliun dari total anggaran seluruhnya 62,27 triliun sampai dengan 2024. Jadi hitungan kami untuk IKN tahun 2020 sampai 2024 itu sekitar 62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan, sampai dengan 2023 ini yang sedang dalam pekerjaan adalah 36,72 triliun, yaitu sebesar 39 paket yang dalam pelaksanaan, 39 paket pekerjaan ini total anggarannya adalah 24,16 triliun, progresnya adalah 29,87 triliun, sedang yang sedang kami lelangkan saat ini sebesar 21,41 triliun, 37 paket pekerjaan dalam proses lelang.

Dukungan infrastruktur dasar IKN tahun 2023 sebesar 26,67 triliun tadi rinciannya adalah:

- Untuk Dirjen Sumber Daya Air 1,13 triliun yaitu untuk drainase utama dan pengendalian banjir dan DAS Sanggai, penyelesaian bendungan Sepaku Semoi, embung 19 embung di kawasan inti pusat pemerintahan dan penyelesaian *intake* sungai Sepaku;

- Dirjen Bina Marga dengan total anggaran 9,72 triliun adalah jalan untuk melaksanakan jalan kerja logistik, KIPP, jalan sumbu kebangsaan sisi timur dan sisi barat, jalan tol IKN, pembangunan jalan lingkaran Sepaku, jalan



akses persemaian di Mentawir untuk apa *nursery*, penghijauan penghutan, pembangunan duplikasi jalan Pulau Balang Bentang Pendek dan karena saat ini yang dibangun oleh Pemda baru satu jadi kita bikin satu lagi supaya menjadi dua lajur sesuai dengan jembatan Pulau Balang yang besar. Kemudian pembangunan jalan akses bandara yang sedang akan dibangun dan pembangunan dermaga logistik;

- Untuk Dirjen Cipta Karya sebesar 11,58 triliun antara lain adalah pembangunan instalasi penjernih air dan bangunan pendukung SPAM Sepaku, jaringan perpipaan transmisi SPAM Sepaku ke arah IKN dan pembangunan air limbah, 1-2-3 di KIPP/Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, kemudian TPST persampahan di KIPP IKN, pembangunan sarana prasarana pemerintahan KIPP IKN, Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden, Kantor Kemenko empat Kemenko, Kemensetneg, PUPR, Masjid Negara dan Beranda Nusantara. Penyiapan KIPP IKN tahap 1 dan 2, penataan sumbu kebangsaan dan Tripuraja serta *line development* untuk sub wilayah pengembangan 1B, 1C.

- Untuk Dirjen Perumahan sebesar 4,20 triliun adalah untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri dan pembangunan rumah susun dan Hankam yang sedang ditender dan mudah-mudahan bulan Juli, untuk pembangunan rusun ASN akan segera dimulai dengan pembangunan rumah tapak menteri sudah dimulai sudah dalam konstruksi.

- Kemudian juga untuk Dirjen Bina Konstruksi sebesar 300 miliar, jadi untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di IKN setelah *management* pengendalian barang jasa dan terkait untuk IKN.

Kami laporkan bahwa untuk di IKN, sekarang ini ada bekerja sekitar 8.000 orang, 30% adalah dari tenaga lokal yang sudah kami berikan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi tenaga kerjanya.

Ibu-Bapak sekalian yang terhormat dan kami hormati,

Selanjutnya, untuk masih dalam evaluasi pelaksanaan APBN. Program padat karya tahun 2023 sebesar 15 triliun dengan progres serapan anggaran sebesar 5 triliun, 33,4% dengan serapan tenaga kerja 141.507 orang dari total target 713.000 orang, dengan rincian:

- Di bidang Sumber Daya Air sebesar 5 triliun dengan progres 29,2% 1,46 triliun;
- Bidang Bina Marga 4,78 triliun dengan progres sebesar 0,71 Triliun atau 15,06%;
- Bidang Cipta Karya 2,11 triliun dengan progres 43,6% atau 0,88 triliun.
- Perumahan, 3,18 Triliun dengan progres 61,32% atau 1,92 triliun.

Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, yang perlu kami laporkan dan ini mungkin juga menarik untuk Bapak-Ibu sekalian, adalah pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan

Daerah telah dilakukan penyiapan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan seleksi, verifikasi dan verifikasi, penetapan prioritas dan penganggaran yang telah dilaksanakan sejak Februari hingga minggu pertama Juni, sehingga bisa dimulai pelaksanaan pekerjaannya pada bulan Juli. Untuk seleksi dan penetapan prioritas telah kami lakukan bersama-sama dengan Bappenas. Jadi kami sudah ada SK Bersamanya dengan Bappenas dan kami untuk pengusulan anggarannya sudah kami sampaikan pada Ibu Menteri Keuangan pada tanggal 5 Juni.

Di tahap pertama ini Bapak-Ibu sekalian, untuk prioritas pertama dari 32,79 triliun IJD ini sesuai yang kami laporkan pada Raker sebelumnya. Itu ada di 32 provinsi, tentunya Jakarta tidak termasuk. Kemudian ruas untuk 573 ruas jalan sepanjang jalannya adalah 2.872 kilometer, untuk jembatan 2.362 meter, total anggaran yang sedang kami ajukan kepada Ibu Menteri Keuangan adalah 14,6 triliun.

*Nah*, ini kami sambil memasukan DIPA-nya, ada juga ada tender dini yang sudah masuk di dalam SK Bersama ini sedangkan ada yang lainnya nanti untuk *e-catalog* menunggu DIPA-nya, jadi prosedurnya adalah untuk *e-catalog* harus sudah ada DIPA-nya. Sembari kami sedang meluncurkan ini prioritas pertama, nanti kami akan susun kembali yang prioritas kedua sisa dari 32,29 dikurangi 14,6. Jadi nanti kami terus berjalan (*suara kurang jelas*) sekali lagi, Juli sudah akan kita mulai pekerjaan perbaikan jalan daerah tadi.

Upaya-upaya percepatan pelaksanaan Tahun Anggaran 2023, yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan, antara lain:

- Menyelesaikan progres pengerjaan barang dan jasa;
- Mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran;
- Menyelesaikan masalah tanah, dan;
- Mempercepat penyelesaian kegiatan padat karya sesuai target dan sasaran.

Termasuk juga kami laporkan Bapak-Ibu sekalian, kami juga sudah diizinkan oleh Ibu Menteri Keuangan untuk memanfaatkan *automatic adjustment* yang selama ini di-*hold*, kita buka untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan.

Bapak Ketua, Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Kemudian yang kedua adalah kami laporkan hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2022, jadi di halaman 17 dan 18. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI atas laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2021 dan 13 laporan keuangan pinjaman luar negeri tahun 2021, Kementerian PUPR memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Pada semester I tahun 2022, Kementerian PUPR menerima 18 laporan hasil pemeriksaan dengan total 302 rekomendasi dengan rincian:

1. 1 LHP atas laporan keuangan tahun 2021 dengan 101 rekomendasi;
2. 2 LHP kinerja, jadi laporan hasil pemeriksaan kinerja, antara lain: pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkaran luar dan penyediaan infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk mendukung transportasi perkotaan berkelanjutan tahun 2023 sampai dengan semester I tahun 2021 dengan 39 rekomendasi. Dan dua, penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat dengan 36 rekomendasi;
3. Ada 1 LHP pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas belanja program pembangunan sentra produksi pangan *food estate* tahun 2020 sampai dengan triwulan III 2021 dengan 9 rekomendasi;
4. 1 LHP atas laporan keuangan belanja subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan tahun 2021, yaitu merupakan bagian anggaran 999.07 dengan 17 rekomendasi;
5. Ada 13 LHP atas laporan keuangan pinjaman hibah luar negeri dengan 100 rekomendasi.

Dari total 300 rekomendasi tersebut, Kementerian PUPR telah menindaklanjuti sebanyak 245 rekomendasi atau 81,13% dan sedang dalam proses perbaikan tindak lanjut sebanyak 57 rekomendasi atau 18,87%.

Ketiga, pokok temuan pada masing-masing LHP di atas dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2021 yang memuat opini wajar tanpa pengecualian terdapat 32 temuan dan 101 rekomendasi senilai 89,75 milyar. Adapun status tindak lanjut atas 101 rekomendasi tersebut adalah telah ditindaklanjuti 76 rekomendasi dan perbaikan tindak lanjut 25 rekomendasi.

2. Laporan hasil pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkaran luar dan penyediaan infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk mendukung transportasi perkotaan berkelanjutan tahun 2019 sampai dengan semester I tahun 2021 dengan 16 temuan dan 39 rekomendasi senilai 0 rupiah. Status tindak lanjutnya atas 39 rekomendasi telah ditindaklanjuti 25 rekomendasi dan perbaikan tindak lanjut 14 rekomendasi;

- 2) Penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat dengan 13 temuan dan 36 rekomendasi senilai 0 rupiah. Statusnya dari 36 rekomendasi tersebut, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti;

- 3) Laporan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu, belanja program pembangunan sentra produksi pangan *food estate*

tahun anggaran 2020 sampai dengan triwulan II 2021 dengan 4 temuan dan 9 rekomendasi senilai 0 rupiah. Statusnya adalah 9 rekomendasi, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti;

4) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan belanja subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan muka perumahan tahun 2021 ke bagian anggaran 999.07 dengan 7 temuan dan 17 rekomendasi senilai 49 milyar. Status tindak lanjutnya atas 17 rekomendasi telah ditindaklanjuti 15 rekomendasi dan perbaikan tindak lanjutnya 2 rekomendasi;

5) Laporan hasil pembangunan atas laporan keuangan pinjaman hibah luar negeri dengan 43 temuan dan 100 rekomendasi senilai 34 miliar. Statusnya adalah seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Yang keempat, dengan demikian berdasarkan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2005 sampai 2022 sesuai Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI Kementerian PUPR mencapai status selesai sebesar 71,89%. Selain itu, sampai saat ini masih terdapat 351 rekomendasi yang sedang dalam proses penelaahan BPK RI yang dapat meningkatkan capaiannya apabila itu telah berhasil menjadi 80,17%.

Kelima, selanjutnya Kementerian PUPR terus berupaya melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI dengan upaya langkah-langkah percepatannya sebagai berikut:

1) Penilaian kinerja berbasis progress penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK RI;

2) Penyederhanaan dan pembagian tugas yang jelas antara APIP, unit, kepatuhan internal di Unor, Unor sendiri dan Satker dalam melaksanakan penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK RI. Jadi sekali lagi kami di Kementerian PUPR dalam pengawasan ini menganut sesuai arahan dari BPK dan BPKP yaitu *three line of defence*. Di balai Satker merupakan tingkat pertama, UKI di Unor merupakan tingkat kedua dan APIP-nya menjadi tingkat ketiganya, jadi bertahap;

3) Pemantauan dan pembahasan dengan seluruh pihak terkait terutama dengan BPK RI secara berkala;

4) Meningkatkan pembinaan pengendalian penatausahaan PNBK;

5) Menginstruksikan kepada Kepala Balai, unit kepatuhan internal sekretariat jenderal agar lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian paket pekerjaan;

6) Kemudian pengelolaan dan penatausahaan persediaan dan aset tetap khususnya pengelolaan persediaan, hibah BMN kepada masyarakat dan pengamanan asset;

7) Perbaiki pencatatan aset konsesi jasa pada laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2022. Penyelesaian ini juga kami kaitkan dengan Baperjakat, jadi seseorang yang akan dibahas di dalam Baperjakat maka akan ada klausul tentang penyelesaiannya. Ini menjadi salah satu kriteria eligibilitasnya seseorang untuk dijadikan pejabat atau dipromosi. Ini menjadi efektif pada bagi petugas kami untuk menyelesaikan temuan.

Dan yang ketiga, Ibu-Bapak sekalian yang kami hormati yaitu tentang pendahuluan RKA K/L dan rencana kerja pemerintah tahun 2024. Tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan 7 prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN.D8PP0402/04 tahun 2023 dan Menteri Keuangan Nomor SDS287/MK02 Tahun 2023 tanggal 10 April ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2024 sebesar 128,15 triliun.

Ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU0101MN/1138 tanggal 24 Mei tahun 2023 hal: Penyesuaian Pagu Indikatif Kementerian PUPR Tahun 2024 dengan penyesuaian pagu per unit organisasi sebagai berikut:

- Kami mengusulkan Dirjen Sumber Daya Air 44 triliun;
- Dirjen Bina Marga 49 triliun;
- Dirjen Cipta Karya 27 triliun;
- Dirjen Perumahan 6,619 triliun;
- Dirjen Bina Konstruksi 0,58 triliun; dan
- SIBBB 1,39 triliun.

Kalau Bapak-Ibu sekalian catat, di Bina Marga ini kelihatannya tetap dengan dari 2022, namun kami melihat nanti tahun 2024 masih ada selain izin apa Inpres Jalan Daerah yang sekarang 32 yang mungkin ada nanti *multiyears* ke depannya. Termasuk juga Inpres Tahun 2024 sendiri akan ada alokasinya, jadi nanti masih akan ada tambahannya. Kalau sekarang misalnya 32,7

mungkin tahun depan hampir sama, masih ada tambahan. Ini kami melihat juga kapasitas kami sendiri dalam melaksanakan tugas tersebut.

Kemudian yang ketiga sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh pekerjaan konstruksi tahun 2024 tuntas pada tahun 2024 sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Prioritas utama tahun 2024 yaitu *multiyears contract* dan juga untuk yang kami sebut dengan OPOR yaitu Operasi Pemeliharaan Optimalisasi dan Rehabilitasi, serta khusus untuk direktif Presiden apabila itu hal yang baru.

Empat, rincian terencana kegiatan 2024 per unit organisasi adalah sebagai berikut:

Dirjen Sumber Daya Air dengan pagu 44 triliun. Kegiatan prioritasnya antara lain Menyelesaikan pembangunan, menyelesaikan bendungan yang baru yaitu pembangunan 18 unit bendungan, yaitu bendungan baru Pelosika ini utang *loan* kemudian 7 yang sedang *on going*, yaitu Cibeet, Cijurey, Karangnongko, Cebean, Jenelata, Riam Kiwa, Bendungan Mbay serta 10 yang harus selesai tahun 2024 yaitu Waeapo di Maluku, Bolango Ulu di Gorontalo, Meninting di NTB, Bagong di Jawa Timur, Manikin di NTT, Tiga Dihaji di Sumsel, Bener di Jawa Tengah, Jragung di Jawa Tengah, Budong Budong di Sulawesi Barat, Marangkayu di Kalimantan Timur. Revitalisasi danau meliputi danau Teloko dan danau Tondano.

Kemudian pembangunan irigasi seluas 4000 hektar, menyelesaikan DI. Lhok Guci, Jambo Aye, Komerling dan Slinga di Purbalingga. Dan rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 38.000 Hektar DI Rentang, DI Rengrang, Cihaur, Glapan dan Sadang. Jaringan irigasi ini juga yang baru terutama untuk melengkapi nanti bendungan-bendungan yang sudah selesai sebelumnya. Pembangunan pengendali banjir dan pengamanan pantai sepanjang 57,5 kilometer antara lain di *floodway* Sikambang Sumut, kemudian banjir kali Bekasi, penanganan pantai Jakarta, banjir kawasan Tambaklorok, bendung karet sungai Juwono..., Juwana, kali Serang Wulan Drainase SWD I dan SWD II di daerah Kudus dan Pati, kali Kencing Drain di Demak Kudus dan pengamanan pantai Cilacap.

Selanjutnya adalah pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m<sup>3</sup>/detik di bendung Kuring Aceh, air baku bendungan Kuningan, air baku Touleng Jawa Tengah dan air baku Lanny Jaya di Papua. Kemudian pembangunan embung 7 unit yaitu embung Tukad Unda di Bali, embung di KIPP di Kaltim IKN.

Dirjen Bina Marga sebesar 49 triliun kegiatan prioritasnya antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 44,37 kilometer yaitu di Serang Panimbang untuk penyelesaian Serang Panimbang dan Serang Demak...Semarang Demak. Semarang Demak ini untuk pembebasan lahan yang tadinya dianggap tanah musnah itu sudah ada Perpresnya sudah terbit dua minggu yang lalu, sekarang sedang diinventarisasi di-*appraise* untuk ada ganti untungnya, jadi tidak lagi dianggap sebagai tanah musnah.



Mudah-mudahan dengan itu akan segera selesai sepenyediaan anggarannya tahun ini ada 1,1 triliun yang diambilkan dari *automatic adjustment* yang kemarin dibintang sudah dibuka untuk pembayaran tanah tol Semarang-Demak ini, sehingga dengan demikian mudah-mudahan akan segera dapat dimulai yang paket lautnya ini.

Kemudian juga konektivitas di Bayung Lencir-Tempino di jalan tol trans Sumatera, ini meneruskan dari Betung. Kemudian pembangunan jalan sepanjang 337,44 kilometer antara lain di Geumpang Pameu Lahewa Afulu di Nias, Sebuluh Sarampa di Sumut, Teluk Tapang di Sumbar, (*suara kurang jelas*) di Sumbar, Teluk Buton Kelarik Kepri, Sekunyam, desa (*suara kurang jelas*) Kepri, Mohammad Yamin Bangkinang, Lingkar Utara Jatigede, Lingkar Tuban dan Lingkar Utara Lamongan, Pansela di Jatim untuk penyelesaiannya, Rasojasa dan... Rasojaya batas negara Kalbar, Sidingseluas-Sekayan Kalbar, Malino Semanu Kaltara, Singaraja-Mengwitani Bali, ...(rekaman suara kurang jelas) NTT, *Bypass Maminasata* Sulsel, Wanggar-Kwatisore Papua, Kwatisore-Kampung Muri Papua, Kemiri-Depapre Papua, ini untuk penyelesaian di Jayapura Wamena. Kemudian akses PLBN Yetetkun Papua, Lingkar Sorong-Papua Barat, ...(rekaman suara kurang jelas) Papua Barat, serta dukungan jalan dalam kawasan inti pemerintahan di IKN, serta jalan dan jembatan mendukung IKN Kaltim IKN.

Yang ketiga adalah pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2,31 kilometer antara lain Kuring-Tamiang Aceh, Kuring-Pedada Aceh, Nanga Semangut-Putussibau Kalbar, jembatan paralel perbatasan 5 Kaltim, Wai Maskano Maluku, Ake Maluku Maluku Utara, Kampung Muri-Kwatisore Papua Barat, Elelim-Membramo Papua. Kemudian peningkatan aksesibilitas *flyover underpass* terowongan sepanjang 918,75 meter antara lain *flyover* Bantaian Sumsel, Gelumbang Sumsel, Nurtanio Jabar, Aloha Jatim dan Canguk Jateng. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 1.663,14 kilometer serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 6 kilometer atau 6.000 meter. Kemudian preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 kilometer, jembatan nasional sepanjang 510 kilometer dan revitalisasi drainase dan jembatan gantung serta padat karya.

Selanjutnya adalah rincian program prioritas Dirjen Cipta Karya dengan pagu sebesar 27 triliun. Pertama adalah pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.800 liter/detik, antara lain pembangunan SPAM Bintang Bano Kabupaten Sumatera Barat, SPAM Gunungsitoli di Sumut, SPAM IKK Tapung Hulu Kabupaten Kampar, SPAM regional Wosusokas di Wonogiri Jawa Tengah, SPAM regional Benteng Kobema Bengkulu, SPAM IKK Katulampa Kota Bogor, prasarana air minum IKN.

Perluasan SPAM, kemudian juga perluasan SPAM sebanyak 20.638 sambungan rumah, antara lain pembangunan SPAM regional Jatiluhur I di Kabupaten Karawang Bekasi, SPAM regional Burana Titab Bawah Bali segmen

Pangkung Paruk-Pengulon dan SPAM berbasis masyarakat di 1.883 desa berupa kegiatan Pamsimas.

Yang kedua, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan sekitar 11.370 KK antara lain Jakarta *Sewerage Development Project* zona I, pembangunan IPLD Samosir, optimalisasi SPAL skala Kota Banda Aceh. Jadi ini yang sudah dibangun tapi belum optimal, kita optimalkan, ini tadi yang kayak OPOR tadi. Kemudian pembangunan IPAL Samosir, prasarana sanitasi IKN.

Kemudian sistem pengolahan persampahan dengan layanan sekitar 222.000 KK antara lain pembangunan TPA Samosir, TPST di Gianyar, Bandung, Cimahi, Bekasi, Indramayu, Depok, Cianjur, Cilegon, Padang, Tuban, Denpasar dan Nias Utara, serta prasarana persampahan IKN dan sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas di 1.546 lokasi TPS3R di 173 lokasi dan sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan.

Selanjutnya adalah penataan kawasan strategis pariwisata nasional dan kegiatan strategis lainnya seluas 342 hektar antara lain penataan kawasan KSPN Bromo Tengger Semeru tahap 2 dan 3, Penataan kawasan *waterfront* Marina dan Keraton Lia KSPN Wakatobi, penataan kawasan Malalayang dan Bunaken tahap 2, karena harus ada perpanjangannya, penataan kawasan Dieng Kabupaten Wonosobo, penataan kawasan pembangunan infrastruktur pemukiman mendukung rumah khusus bagi warga eks Timor Timur di Kupang dan penyiapan kawasan IKN sumbu kebangsaan di IKN serta sistem proteksi kebakaran dan pembangunan infrastruktur pemukiman berbasis masyarakat melalui program PISEW di 738 kecamatan.

Kemudian juga dilakukan pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 m<sup>2</sup> antara lain pembangunan gedung pusat amanah di Aceh, dalam rangka penyelesaian *non-justicia* dari pelanggaran HAM berat yang akan dibangun gedung amanah seperti di Papua untuk *Youth Papua Center*.

Kemudian pembangunan Mako Paspampres, pembangunan stasiun pemantauan SPPKL Natuna, pembangunan gedung KONI, rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan perkantoran Kabupaten Sigi karena bencana, rekonstruksi Masjid Agung Syuhada Sulawesi Barat, rekonstruksi gedung DPRD Sulawesi Barat dan lain-lain. Dan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 4 kawasan, pembangunan kawasan Taman Balai Kambang Solo, rehabilitasi benteng Pendem Willem Ambarawa Jawa Tengah, penataan kawasan Borarsi Manokwari dan rehabilitasi Kesultanan Ternate. Dan pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit antara lain gedung pusat pemerintahan I dan II, gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 4 Kemenko, gedung dan kawasan kantor Kemensetneg dan masjid negara.

Selanjutnya adalah rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah madrasah sebanyak 328 unit yang tersebar di seluruh Indonesia dan pembangunan dan rehabilitasi PTKIN sebanyak 17 unit antara lain



pembangunan gedung gelanggang inovasi dan kreativitas Universitas Gadjah Mada, gedung laboratorium keagamaan UIN Antasari Banjarmasin, gedung Universitas Halu Oleo, gedung kuliah Universitas Malikussaleh, Gedung UIN Andalas, laboratorium lapangan geologi UGM dan Universitas Tan..., Tadulako. Rehabilitasi dan renovasi pasar sebanyak 16 pasar antara lain renovasi rehabilitasi pasar Godean DIY, Banjarsari di Pekalongan, pasar Jongke di Surakarta, pasar Baros di Serang, pasar Kolpajung Pamekasan, Pasar Raya Kota Padang dan lain-lain. Dan pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 6 unit antara lain pembangunan prasarana PON Aceh-Sumut di 13 *venue*, renovasi stadion Sumatera Utara, pembangunan venue dayung PON di Aceh, kemudian renovasi stadion Kanjuruhan Malang dan pembangunan asrama Pangalengan.

Selanjutnya di Direktorat Jenderal Perumahan dengan alokasi anggaran 6,19 triliun, kami prioritaskan antara lain untuk sektor rumah susun, antara lain lanjutan pembangunan rumah susun ASN dan Hankam di IKN sebanyak 47 *tower* dan lanjutan pembangunan rumah susun sebanyak 40 unit 1 *tower*. Kemudian sektor rumah khusus antara lain untuk lanjutan pembangunan hunian tapak jabatan menteri, lanjutan *loan* hunian tetap di pasca bencana Sulawesi Tengah. Kemudian rumah khusus untuk masyarakat terdampak bencana 94 unit, pembangunan BSU sebanyak 820 unit untuk perumahan bagi MBR yang tersebar di beberapa provinsi dan dukungan penanganan kemiskinan ekstrim melalui program padat karya skema BSPS sebanyak 45.875 unit. Juga akan dilakukan dukungan manajemen untuk Bina Konstruksi, Ditjen Pembinaan Infrastruktur...Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, BPSDM, BPIW, Setjen dan Irjen sebesar 1,97 triliun.

Kelima, pelaksanaan kegiatan dengan pola padat karya tahun 2024 tetap dialokasikan anggarannya dengan perkiraan serapan tenaga kerja 308.000 orang di bidang Sumber Daya Air melalui P3TGAI antara lain bidang jalan dan jembatan dengan target serapan 20.000 orang. Bidang Pemukiman Cipta Karya dengan target 47 orang dan Bidang Perumahan dengan target serapan 91.000 orang khususnya melalui dukungan penanganan kemiskinan ekstrim melalui program padat karya skema BSPS.

Bapak Ketua dan Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Demikian yang dapat kami laporkan dari tiga hal yang akan dibahas pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih penjelasannya Pak Menteri.

Mempersingkat waktu kita lanjut kepada teman-teman yang ingin melakukan pendalaman.

Yang pertama Pak Mulyadi.  
Silakan Pak Mulyadi.

**F-GERINDRA (DRS. H. MULYADI, M.MA.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.*  
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan yang saya hormati,  
Rekan-rekan Anggota yang saya hormati,  
Pak Menteri beserta seluruh jajaran Kementerian PUPR, senantiasa sehat Pak,

Pertama, tentu kami mengapresiasi, Pak, atas pelaksanaan APBN sampai dengan bulan Mei 2023, Pak. Namun, dalam konteks pengawasan dan bagian dari mitra kerja yang harus juga melakukan pendalaman dan evaluasi, kami selalu mengingatkan supaya dalam konteks pembangunan dan apapun arah kebijakan serta anggaran tentu harus tepat sasaran, Pak, kemudian tepat waktu tidak *delay*, kemudian tepat anggaran, tidak membengkak dan terutama juga melibatkan *stakeholder* di daerah dan diujungnya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dimana *project-project* itu dilaksanakan.

Dan terakhir kali tentu kami mengingatkan tentang konsep aset manajemen, Pak, kenapa? Karena walaupun terdengar dan dibaca anggaran yang Bapak kelola begitu besar tapi dengan luasnya Indonesia yang luar biasa ini tentu masih sangat kurang ya, Pak ya. Belum lagi aspirasi-aspirasi daerah dan tentu perlu perhatian.

Kemudian, Pak, terkait IKN, jika diizinkan, Pimpinan, kita juga harus rapat bersama dengan Kepala Otorita IKN. Kenapa? karena besarnya anggaran lebih dari 60 triliun tadi yang saya dengar yang akan dialokasikan melalui mitra kerja kita. Kita harusnya juga bisa mengetahui *action plan*-nya, *time frame*-nya, apa saja *sih* yang dibangun dan seterusnya, terus bagaimana proses kemudian kita bisa melakukan evaluasi dan proses pemindahan dan seterusnya. Kita perlu mendengarkan paparan dari Kepala Otorita IKN, Pimpinan. Jadi saya kira perlu rapat bersama untuk sama-sama kita ikut mengawasi, kenapa? tadi sekali lagi Pak Menteri menyampaikan puluhan triliun dialokasikan untuk persiapan perpindahan ke IKN. Dan kita apresiasi, karena saya kira Pak Menteri *direct* dengan Pak Presiden untuk memastikan *project* itu bisa berjalan *on-time* dan *on schedule*, saya kira ya.

Kemudian, Pak, saya mengapresiasi terkait pelaksanaan instruksi Presiden terkait percepatan jalan-jalan daerah, Pak. Itu saya kira lompatan yang luar biasa, Pak. Saya selalu berkoordinasi juga dengan Pak Dirjen dan teman-teman di Jawa Barat terutama saya harus terus memperjuangkan beberapa titik jalan yang notabenehnya adalah sangat dibutuhkan masyarakat dan mobilitas masyarakat sangat tinggi, Pak ya. Terutama juga ya sekali lagi saya harus utarakan, Puncak, Pak ya. Saya berterima kasih Pak Dirjen melalui timnya di Jawa Barat sudah melakukan survei terhadap potensi alternatif jalan dari mulai Hanjawa masuk ke Citeureup, Pak. Saya kira itu sangat membantu luar biasa kalau itu betul-betul bisa direalisasikan. Saya dengar katanya akan dilelang di Juni ini, mudah-mudahan bisa dikawal dan di eksekusi lah ya, kenapa? karena sekali lagi, Pak, kalau Puncak tersumbat, itu secara alami itu akan ngalir ke sana, Pak, tapi jalannya sangat jelek dan kami harap itu betul-betul bisa direalisasikan, Pak.

Hal lain, Pak, terkait tol Bocimi, Pak, yang saya kira tol Bocimi itu harus dipercepat, Pak. Apalagi di wilayah Cikereteg ya Caringin-Ciawi itu jalannya amblas dan sekarang ada dinamika masyarakat protes ke saya, Pak, karena tidak dibantu untuk mengadvokasi dampak dari Pembangunan, Pak, katanya dalam tanda petik, Pak ya, saya belum survei lagi, banyak yang terganggu dan seterusnya. Tapi terpenting adalah fungsinya, Pak ya, sangat dibutuhkan, jembatan sementara yang Bapak bangun hari ini itu sangat membantu tapi hanya boleh dilintasi oleh motor, Pak ya, jadi mobilnya ini mereka harus berputar. Belum lagi Bocimi-nya ditutup lagi, Pak, Cibadak, jadi kalau Bapak keluar Cigombong itu langsung terjadi lagi antrian yang mengular yang luar biasa. Saya kira percepatan-percepatan di wilayah-wilayah tertentu yang fungsinya harus dioptimalkan harus segera direalisasikan, Pak.

Banyak hal, Pak, tapi karena saya di kesempatan pertama, saya kira teman-teman juga harus menyampaikan. Tapi izin, Pak, hari ini saya membaca salah satu program kerja di Dirjen Sumber Daya Air, Pak, saya apresiasi dan mudah-mudahan bisa segera terealisasi, Pak, bendungan Cibeet dan Cijuray karena itu sudah meredam dinamikanya yang luar biasa, Pak, mudah-mudahan tidak *delay*.

Dan kemudian, Pak, teman-teman Komisi V dengan berganti-ganti Pimpinan sudah berkunjung Pak ke wilayah Bojongkulur, Pak, Gunung Putri ya sudah berkali-kali. Bahkan *alhamdulillah* teman-teman dari Bojongkulur, mohon izin, Pak, Pak Kepala Desa, berdiri, Pak dengan tim komunitasnya, Pak, ingin memastikan bahwa teman-teman Komisi V *concern*, Pak karena ada puluhan ribu orang yang terancam 24 jam yang mengakses saya untuk masuk ke komunitas "Peduli Sungai Cileungsi Cikeas", Pak. Kami mengapresiasi, kenapa? karena hasil kunjungan teman-teman Komisi V ke Bojongkulur ditindaklanjuti melalui Dirjen Sumber Daya Air dengan adanya *study* LARAP. *Nah*, tapi saya lihat di rencana kerja Dirjen Sumber Daya Air, mudah-mudahan masih bisa kita perjuangkan supaya penyelesaiannya komprehensif, Pak. Tidak seperti pemadam kebakaran, walaupun selama ini dari Balai Besar sungai wilayah Bapak itu sudah sangat kooperatif dan komunikatif. *Nah*, lebih *clear* saya izin, Pimpinan, untuk menyerahkan aspirasi warga desa

Bojongkulur. Pak Menteri, mudah-mudahan ini menjadi dasar supaya kita bisa ada *action* yang lebih pasti.

Saya kira itu saja, Pimpinan.  
Izin menyerahkan ini, Pak.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Silakan, silakan.

**F-GERINDRA (DRS. H. MULYADI, M.MA.):**

Terima kasih,

*Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

Mungkin masih ada satu kali penyerahan kalau masih ada teman-teman yang ingin menyerahkan, supaya jangan satu-satu, kalau ada silakan, supaya satu kali penyerahan. Nanti masing-masing? Oh, ya silakan, tapi lama itu kalau masing-masing.

Makasih, Pak Mul.

Kita sekarang sudah menunjukkan waktu hampir setengah 12. Penanya disini ini apa, penanya yang akan mendalami kurang lebih 27 orang lagi. Jadi kalau bisa misalnya, kalau bisa ya, dan tidak bermaksud menghambat apalagi mengurangi hak Bapak dan Ibu semuanya, yang penting-penting saja dan diperjelas dipersingkat penyampaiannya.

Pak Tamanuri, silakan, Pak Tamanuri.

**F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya apresiasi Pak Menteri yang selama ini saya lihat hanya *drummer*, gitar dan nyanyi, ini ditambah lagi fotografis, *nah* itu luar biasa.

Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Wakil Pimpinan,  
Saudara-Saudara saya Para Anggota,  
Pak Menteri beserta jajaran,  
Pak Dirjen, Pak Sekjen,  
Hadirin yang berbahagia,

Saya mengucapkan terima kasih, Pak, apa ini masuk di Inpres 3/23 atau *nggak*, *nggak* tahu saya. Tapi yang jelas Lampung dapat 800 miliar, *nah* Lampung dapat 800 miliar termasuk Sumut dan Jambi. Tapi di sini tadi saya dengar bahwa ada kesalahan-kesalahan mengenai belanja-belanja barang segala macam, diharapkan untuk masa yang akan datang ini agar lebih teliti lagi supaya jangan terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini. Kemudian saya harapkan agak difokuskan sekarang pembangunan jalan-jalan negara. Selain daripada kita ngebangun jalan tol, jalan-jalan negara juga harus kita fokuskan, lebih bawah lagi yaitu jalan-jalan yang menggunakan Inpres Nomor 3 ini. Kenapa semua jalan-jalan daerah itu terutama jalan yang punya pemerintah daerah luar biasa habis-habisan, hancur-hancuran. Jadi oleh karena itu, kalau tidak dibantu oleh pemerintah pusat rasanya sangat sukar pemerintah daerah untuk membangun ini, kenapa? karena ribuan kilometer dengan dana APBD-nya yang sangat terbatas.

Kemudian disitu tadi dalam ekspos Bapak untuk tahun 2024 ada pembangunan jalan dari Simpang Penawar ke Rawajitu dan ini memang sebagian sudah dibangun tahun 2021. *Nah*, harapan saya adalah sisa bangunan ini jangan titik nol-nya di desa Lfil itu tapi masuk ke desa Rawajitu itu yaitu lebih kurang 3 kilometer. Kalau di titik nolnya di desa Lfil maka yang 3 kilometer di dalam itu tidak pernah terbangun, sedangkan pemerintah daerah belum pernah membangun jalan itu.

Kemudian di sini juga yang terakhir tadi Bapak ekspos bahwa ada program padat karya IPS3R. Ini perlu Bapak ketahui bahwa ini para bupati *nggak* mau terima, Pak, program ini, karena apa? karena untuk pemeliharaan selanjutnya diserahkan sama bupati yang kira-kira setiap bulannya 5 juta. *Nah*, jadi ini mubazir, saya dapat tahun ini ada dapat 6, semua bupati *nggak* ada mau terima. *Nah*, oleh karena itu mohon kiranya ini digeser saja ke program-program yang lain apa PISEW apa...apa...apa...apa. Saya pernah juga menyurati Bu Diana ini mohon ditukar ini karena para bupati di situ *nggak* ada yang mau terima. Duit kontan *nggak* ada itu, Pak Basuki *nggak* sedia duit kontan.

Saya berterima kasih juga terhadap temuan-temuan BPK, sudah 81,13% yang sudah dilaksanakan dan dalam proses perbaikan sudah 18,87%. Kemudian ini *nggak* banyak meningkat ini pagu anggaran yang diajukan tahun 2024 sebanyak 128 triliun, yang lalu adalah hanya 125 triliun berarti hanya ningkat 3 triliun. Mudah-mudahan ini tidak ada koreksi, kita harapkan seperti itu supaya yang namanya program-program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat yang Bapak-Bapak bantukan pada kami para Anggota Dewan bisa juga ditambah.

Saya rasa demikian, Pak Menteri.

Makasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

Makasih, Pak Tamanuri.

Pak Sudewo.

**F-GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan seluruh kawan Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang kami banggakan,

Saya cukup bangga dan mungkin malah bangga sekali dengan capaian kinerja Pak Menteri sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 ini. Bahwa progres fisik maupun keuangan itu ternyata pada tren yang positif, lebih bagus daripada tahun 2022. Meskipun beban yang harus dilaksanakan oleh Kementerian PUPR ini lebih berat daripada tahun 2022. Dan dari sekian ratus triliun, 130 triliun lebih ternyata yang menjadi temuan dari BPK hanya sekitar 98 miliar. Itu artinya bisa dikatakan tanpa ada satu temuan yang sangat berarti, ini karena semata-mata kinerja Kementerian PUPR.

Dalam kesempatan ini, saya tidak akan mengajukan yang lebih detail karena berikutnya akan ada rapat dengan masing-masing Dirjen. Yang pertama, ingin saya kasih masukan kepada Pak Menteri bahwa yang kontrak sebesar sekitar 70% baik itu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, ini mohon tidak hanya mencapai dalam tataran kuantitas tetapi juga dalam tataran kualitas. Masih ada sekitar 30% yang belum dikontrak, ini saya harap menjadi kehati-hatian Kementerian PUPR supaya unsur kualitas kontrak itu betul-betul diperhatikan. Mengingat di tiap tahunnya selalu ada masalah pelaksanaan pekerjaan di lapangan, baik itu karena peralatan yang tidak memadai, mungkin karena sumber daya manusianya, karena teknologinya, mungkin juga karena *performance* secara menyeluruh kontraktornya yang tidak baik begitu, itu terjadi di mana-mana.

Ini setidaknya menjadikan pembelajaran pada fase proses tender ini. Karena yang terjadi di lapangan itu ada kaitannya dengan tahapan pelaksanaan tender. Jadi tidak bisa dipisahkan dinamika yang terjadi pada saat pelaksanaan konstruksi dengan apa yang dilakukan pada saat proses tender, proses tender itu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan konstruksi. Jadi saya mengingatkan saja kepada Kementerian PUPR, jangan hanya mengejar kuantitas, sekian paket itu harus dilaksanakan, harus selesai pada kurun waktu tertentu pada bulan tertentu, tetapi dari unsur kualitas kurang mendapatkan perhatian. Jangan sampai ada satu laporan lagi, bahwa pekerjaan kecil saja



contoh jembatan gantung yang nilainya hanya 2 miliar, 3 miliar, itu ditinggal oleh kontraktornya. Kemudian *supply-supply* material orang-orang bisa saja tidak dibayar, rumah susun juga begitu, apa lagi yang pekerjaan berat, pekerjaan besar itu banyak sekali dinamika, maka pada tahap pelaksanaan tender ini lah kami memberikan masukan kepada Kementerian PUPR, supaya unsur kehati-hatian, pencermatan terhadap segala unsur yang harus diverifikasi ini betul-betul lebih detail.

Apabila perlu dilakukan verifikasi secara faktual, apakah kontraktor tersebut itu betul-betul punya peralatan atau tidak? Ya, jangan sampai dia punya dokumen-dokumen hitam di atas putih, tetapi dukungan secara riil tidak ada. Jadi saya hanya mengingatkan, bahwa untuk mengejar kuantitas, target yang harus diselesaikan jumlah paket itu memang penting, tapi kualitas juga harus menjadikan suatu perhatian.

Berikutnya, saya cukup bangga dengan kebijakan Presiden yang turun ke Provinsi Lampung, turun ke Provinsi Jambi, mungkin berikutnya akan turun ke provinsi-provinsi yang lain untuk ikut serta mengatasi kondisi jalan daerah yang dalam kondisi rusak. Jadi, saya cukup bangga. Mengapa bangga? karena Presiden sudah punya payung hukum untuk melaksanakan itu untuk memberikan perhatian kepada pemerintah daerah, memberikan perhatian kepada jalan-jalan daerah baik itu jalan provinsi maupun jalan kabupaten yaitu namanya Inpres Nomor 3 Tahun 2023. Dan Inpres Nomor 3 Tahun 2023 ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini merupakan inisiasi Komisi V yang *alhamdulillah* disambut baik oleh Bapak Menteri, sehingga dilanjutkan pembahasan dan pada akhirnya ada satu persetujuan bersama, kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan DPR menjadi sebuah undang-undang.

Dan pada kenyataannya undang-undang ini betul-betul diharapkan oleh masyarakat secara luas. Artinya kami menginisiasi itu tidak atas dasar asumsi, tetapi betul-betul karena mencermati kondisi yang ada kenyataan di lapangan. Bukan atas dasar asumsi tapi benar-benar mencermati kenyataan di lapangan, merespon dan mengakomodir kondisi yang ada, sehingga undang-undang ini benar-benar aplikatif. Saya bangga dengan karya kita, karya kita itu mengapa saya sebut kita? karena ini antara Komisi V dengan Bapak Menteri PUPR. Kita di sini maupun di tempat luar pagi sampai pagi, pagi sampai malam bekerja terus menyusun undang-undang itu dan pada kenyataannya dengan undang-undang itu ditetapkan, bisa digunakan oleh Bapak Presiden, bisa digunakan oleh Bapak Menteri PUPR untuk memperhatikan pemerintah daerah, yaitu melalui anggaran Inpresnya.

Namun demikian, Pak Menteri, kami juga berharap bahwa supaya apa yang menjadikan aspirasi kawan-kawan yang telah bekerja secara riil melahirkan undang-undang ini, itu mendapatkan perhatian penuh dari Pak Menteri. Perhatian penuh dari Pak Menteri karena memang kitalah yang bekerja. Bukan berarti ini pakai unsur subjektif, tidak, tidak ada unsur suka dan

tidak suka, karena memang apa yang disampaikan oleh kita itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan diakomodir atau tidak diakomodir, memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria itu oleh Pak Menteri sudah ada satu kebijakan yaitu perlu diklarifikasi di-*check* terlebih dulu oleh balai-balai yang di lapangan. Kalau memang memenuhi kriteria bahwa itu jalan kabupaten atau jalan provinsi dalam kondisi rusak, saya mohon untuk bisa diakomodir.

Yang berikutnya adalah saya ingin komplain Pak Menteri. Saya sebenarnya tidak ingin saya sampaikan sampai forum ini tetapi karena tidak bisa diatasi di tingkat bawah di tingkat Dirjen dan ini sangat-sangat mengganggu *performance* kami sebagai Anggota DPR RI terhadap masyarakat khususnya pada kegiatan pelatihan tukang, Pak Menteri. Jadi pelatihan tukang ini kayaknya masih setengah hati. Ini mohon maaf sekali lagi seharusnya tidak saya sampaikan sampai kepada Pak Menteri, cukup harusnya cukup sampai pada Dirjen, tapi karena Dirjen tidak mampu menyelesaikan ini, saya harus sampaikan kepada Pak Menteri, dan ini menjadi keresahan semua Anggota Komisi V, bukan hanya saya. Mana mungkin yang namanya pelatihan tukang, upahnya hanya antara 85.000 atau 95.000 sampai 130.000 dan akhirnya diambil yang paling bawah, yaitu sekitar 95.000, ini tidak masuk akal. Ketika saya klarifikasi yang kajian disodorkan kepada saya itu acuannya adalah rapat di luar. Rapat di luar itu kan bukannya tukang, rapat di luar itu artinya dia orang kantor yang rapat di luar kantor kemudian mengacu aturan itu, ini sangat-sangat tidak masuk akal gitu ya.

Jadi bukan masalah angkanya yang 95.000 tetapi dasar aturan mainnya ini yang tidak logis begitu ya, dasar yang dipakai acuan itu tidak masuk akal. Bukan berarti saya tidak mampu atau kawan-kawan tidak mampu untuk menambah 95.000 itu menjadi wajar 130.000 atau 150.000 sesuai situasi kondisi di kampungnya masing-masing, bukan berarti kita tidak mampu, tapi dasar yang dipakai itu memang tidak logis. Dan yang namanya Bimtek itu ada di Basarnas ada di BMKG juga ada di Kementerian Perhubungan. Itu uang *transport* itu ya, 150.000 bagi masing-masing peserta. Dan saya cek dengan Komisi IX di Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja melakukan Bimtek itu ya, 150.000 itu memang wajar seperti itu dalam kondisi di lapangan seperti itu tapi kenapa di Dirjen Bina Konstruksi hanya 95.000. Kalau PU dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi atau Direktorat Pelaksana Teknis itu membuat harga satuan upah pekerja selalu disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang itu sekitar 150.000, tetapi mengapa untuk di Bina Konstruksi berbeda sekali. Ini mohon maaf, ini saya terpaksa complain, Pak Menteri, karena ini semua memang kawan-kawan menitipkan pesan ini untuk disampaikan kepada Pak Menteri supaya ini dilakukan suatu perubahan. Sesuatu yang tidak wajar memang ini, Pak Menteri.

Berikutnya, saya mohon untuk jalan tol Semarang-Demak itu dilanjutkan pembangunannya di tol Demak-Tuban, Pak Menteri. Mohon maaf ketika Komisi V RDP dengan BPJT beberapa hari yang lalu, memang saya agak keras, karena apa? karena rencana pembangunan jalan tol Demak-Tuban itu ternyata tidak masuk dalam perencanaan oleh BPJT, oleh BPJT baik itu perencanaan, studi, apalagi target itu untuk direalisasikan, tidak ada sama sekali. Karena



menurut hemat saya dan juga menurut hemat banyak orang ya karena ini memang sama-sama orang awam, bahwa Pantura ini, Surabaya-Semarang ini memang layak untuk dibangun jalan tol itu dari dulu, bukan sekarang saja. Tapi sampai sekarang itu tidak disenggol sama sekali oleh BPJT. Jadi saya memang agak keras, saya mempertanyakan profesionalitas BPJT *tuh* bagaimana?

Meskipun jalan tol itu dibangun dengan skema pendanaan investasi, tapi pembebasan lahan itu kan uang negara. Uang negara juga harus dipertanggungjawabkan secara profesional dan akuntabilitas. Kalau BPJT melakukan seperti itu dia menitikberatkan prioritas pembangunan ruas jalan tol tertentu yang pada kenyataannya itu sepi, itu kan sama saja tidak peduli terhadap uang negara, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap penggunaan uang negara. Maka saya dan saya yakin Pak Menteri tidak sependapat dengan Kepala BPJT pada saat itu, itu saya yakin khususnya dalam konteks rencana jalan tol Demak-Tuban, khususnya dalam konteks perencanaan jalan tol Demak-Tuban, saya yakin Pak Menteri setuju ini. Setuju hanya implementasi kebawahnya baik itu Dirjen Pembiayaan Infrastruktur maupun BPJT lah yang perlu. Saya pernah komunikasi juga dengan Pak Herry TZ, katanya sudah ada surat menteri soal rencana pembangunan jalan tol Demak-Tuban ini yang diberikan kepada Bappenas. Dan saya kalau bisa saya minta juga suratnya syukur-syukur bisa ikut memperjuangkan. Karena ini memang daerah yang memang perlu dibuka supaya wilayah perekonomian di sana itu menjadi berkembang dengan hadirnya jalan tol. Dan saya yakin Pak Menteri juga sangat paham, sangat tahu persis, bagaimana kondisi lalu lintas di Pantura, Demak, Tuban ini ini betul-betul sudah *overload* di luar kapasitas. Dan saya yakin pula Pak Menteri mengakomodir ini hanya persoalannya yang di bawah yang belum berjalan.

Saya, terima kasih sekali kepada Pak Menteri, bendungan Cabean diakomodir, bendung Karet sungai Juwana diakomodir ini *alhamdulillah*. Mudah-mudahan yang pelebaran muara sungai yang Pak Menteri datang secara langsung di tempat yang melihat langsung kondisi di sana memang memerlukan itu. Juga bisa terakomodir di 2024 dan ketika saya pantau di balai besar wilayah sungai Pemali-Juwana, katanya sudah masuk dalam suatu perencanaan dan mudah-mudahan itu segera selesai segera dilelangkan.

Yang terakhir, Pak Menteri, OP di daerah kami ini memang penting Operasional Pemeliharaan di daerah kami, karena banyak sekali penyempitan atau endapan di anak-anak sungai Juwana ini dan karena faktor itulah di Kabupaten Pati menjadi langganan banjir. Jadi, memang biaya OP untuk di wilayah Kabupaten Pati mungkin menjadi perhatian pengalokasian anggaran yang lebih daripada yang lain.

Ini saya ekstra untuk menambah satu saja, Pimpinan, mohon maaf. Tadi oleh Pak Menteri ada satu penataan kawasan di Dieng Wonosobo, itu saya setuju sekali, saya setuju sekali. Tetapi juga saya mohon kepada Pak Menteri dan Dirjen Cipta Karya, penataan kawasan di Makam Ki Ageng Selo, Ibu Dirjen ya, Ki Ageng Selo Kabupaten Gerobogan hendaknya menjadi satu perhatian juga. Saya akan sedikit cerita supaya Dirjen Cipta Karya dan Bapak Menteri itu

betul-betul menjadikan perhatian kawasan Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu adalah leluhurnya Keraton Solo dan Keraton Jogja. Dan konon katanya pemimpin bangsa, Presiden itu mengkaitkan dirinya selalu dengan Keraton Solo dan Keraton Jogja. Pak Sudjadi, senior saya, mohon dikoreksi kalau saya salah gitu ya gitu. Jadi Ki Ageng Selo itu anaknya Getas Pandowo, Getas Pandowo itu anaknya Bondan Kejawen, Bondan Kejawen itu anaknya Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir gitu ya.

**F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

Ahli sejarah rupanya.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Ki Ageng Selo itu punya anak namanya Ki Ageng Enis, Ki Ageng Enis punya anak namanya Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Pemanahan *tuh* punya anak Danang Sutowijoyo yaitu Panambahan Senopati, raja pertama Mataram Islam, Panambahan Senopati punya anak namanya Prabu Hanyokrowati, Prabu Hanyokrowati punya anak namanya Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo punya anak.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Kok jadi baca sejarah *nih*, Pak?

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Amangkurat I, Amangkurat II. Amangkurat II mendirikan kerajaan Mataram yang kedua yaitu di Kartosuro kemudian berpindah ke Kasunanan Solo oleh Pangeran Puger yang kemudian berubah nama raja yaitu Kasunanan berpecah menjadi Mangkunegara dan Sultan. Jadi, Ki Ageng Selo ini memang punya kontribusi besar untuk pembangunan di pulau Jawa yaitu dengan Keraton Solo dan Keraton Jogja.

Inilah saya uraikan sampai panjang lebar kepada Pak Menteri dan Bu Dirjen Cipta Karya, supaya penataan kawasan Ki Ageng Selo ini. Karena saya terlambat memberikan masukan kepada Pak Menteri. Kalau saya memberikan masukan Pak Menteri, mungkin dua tahun yang lalu, Pak Menteri sering ziarah atau meditasi berdoa di Ki Ageng Selo, mungkin bisa menjadi Capres atau Cawapres sekarang. Karena mohon maaf Pak, banyak sekali yang memang nanganu, Pak, berdoa di sana, karena ini memang Jawa-nya seperti itu.

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih. Mohon mendapatkan perhatian dari Pak Menteri PU, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

**F-PDI PERJUANGAN (IR. SUDJADI):**

Interupsi Ketua, Ketua interupsi.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Iya.

**F-PDI PERJUANGAN (Ir. SUDJADI):**

Yang belakang benar sekali, pertanyaan yang depan-depan, saya tidak tahu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Iya, itu ciri-ciri Pak Dewo, ciri Pak Dewo di Komisi V.

Kemudian Pak Syarif, silakan Pak Syarif.

**F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

Makasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat siang,

Pimpinan Rapat Komisi V,

Rekan-rekan Komisi V yang saya hormati,

Bapak Menteri beserta seluruh jajaran rapat pada hari ini,

Tentu ini merupakan rapat juga yang sangat strategis karena beberapa waktu lalu Menteri Keuangan sudah menyampaikan kebijakan umum terhadap termasuk rencana anggaran di tahun 2024. Dan tentu saat ini Komisi XI dan Komisi VII sedang merampungkan terhadap asumsi perhitungan APBN kita untuk 2024. Tentu rapat hari ini merupakan juga yang tentu menjadi sangat strategis di dalam perencanaan ke depan.

Yang pertama, tentu kami sudah mengikuti pada periodesasi ini selama lebih kurang empat tahun sudah berjalan. Saya kira berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tentu kita akan sangat mengapresiasi berkaitan dengan ini karena sudah cukup besar terhadap peranan infrastruktur di dalam pertumbuhan ekonomi tentunya itu yang saya sampaikan.

Yang kedua, berkaitan terhadap Inpres yang saat ini telah direalisasikan kepada daerah-daerah, ini tentu merupakan suatu hal terobosan yang cukup baik. Karena memang ini merupakan persoalan yang selama ini menjadi permasalahan daerah terutama berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah dalam rangka untuk melaksanakan hal ini.

Namun, dengan demikian tentu kita berharap juga ini karena masih ada juga ini, Pak Menteri, keluhan-keluhan ini berapa daerah kabupaten yang merasa masih belum terakomodir terhadap hal ini:” *Pak, ini kok kami di diskriminasikan,*” katanya? Ini tentu merupakan suatu hal yang juga harus menjadi perhatian karena kemudian ada malahan kabupaten yang cukup lumayan terhadap alokasi infrastruktur ini.

Kemudian, selain itu, tentu Pak Menteri di 2024 karena kami yang beberapa waktu lalu di beberapa daerah juga masih ada jalan-jalan nasional mungkin yang perlu harus kita selesaikan. Saya kira karena ini mungkin anggaran di 2024 ini pada anggaran yang terakhir ya untuk periodisasi ini ya tentu ini harus menjadi prioritas saya kira untuk di 2024.

Kemudian, selain itu, tentu saya ada beberapa hal yang berkaitan terutama saya kembali ke Dapil terhadap progres jembatan Sambas, Pak, ini nampaknya agak lamban, saya sudah berkunjung ke sana. Mungkin ini perlu di agak sedikit ini, tapi kalau jembatan Kapuas 1 progresnya cukup cepat. Jembatan Sambas ini kita berharap di 2024 ini paling akhir kan bisa diresmikan ini Pak Menteri, tapi kemarin saya lihat masih baru pemancangan itu. *Nah*, ini tentu menjadi harapan untuk kita bersama.

Kemudian saya, Bu Dirjen Cipta Karya berkaitan dengan beberapa waktu lalu sampai sekarang saya tanya belum diakomodir juga terhadap penataan makam kesultanan itu. Waktu itu Ibu akan coba akomodir pada sisa anggaran, karena ini merupakan suatu hal yang situs bersejarah dan juga merupakan destinasi wisata religius yang saya kira pengunjungnya cukup ramai baik dari dalam maupun dari luar daerah. Ini saya mohon untuk perhatian ini.

Selain itu, berkaitan dengan program-program yang berkaitan dengan kerakyatan itu yang saya mengusulkan di 2024 ABSAH itu, Pak, daerah kami sangat memerlukan itu. Ternyata setiap saya turun ke daerah-daerah terutama di lembaga masjid maupun pesantren, ternyata itu sangat diharapkan. Karena gini, Pak, di Kalimantan khususnya di daerah saya di Kalimantan Barat itu untuk sumur bor itu itu memang *ndak* bisa, sampai kedalaman 200 meter itu pun *ndak* bisa, karena zat besinya apa cukup tinggi sehingga tidak bisa menghasilkan air bersih. Satu-satunya karena daerah Kalbar itu daerah yang cukup tinggi apa curah hujannya, saya kira memang ABSAH ini sangat tepat dalam rangka untuk apa untuk memberikan solusi terhadap air bersih. Karena masih ada di daerah-daerah kami itu yang masih belum sampai air bersih, kemudian daerahnya juga cukup jauh, daerah-daerah yang memang kalau sudah musim ini untuk mandi saja sangat sulit. Saya ada beberapa pondok pesantren pada waktu berkunjung mereka sangat mengharapkan itu. Karena memang ketika musim

kemarau seperti sekarang ini sangat memang sulit untuk mencari air bersih. Salah satunya ya dengan ya dengan ABSAH itu cukup membantu lah untuk hal-hal pada saat-saat musim-musim sekarang ini.

Selain itu, saya dalam kesempatan ini juga berharap karena ini di program di tahun 2024 ini merupakan yang terakhir. Daerah saya khususnya di daerah tempat kelahiran saya itu merupakan tetangga kota yang penduduknya sekarang sudah sekitar 600.000, baru 15%, Pak, yang bisa merasakan air bersih. Dan saya terima kasih pada waktu yang lalu juga sudah diakomodir dua tahun yang lalu di Kubu Raya itu, dan pada saat kemarin memang sekarang semuanya sudah siap, Bu, termasuk DED dan sebagainya segala persyaratan-persyaratan itu.

Saya berharap di tahun 2024 ini bisa diakomodir lah dalam rangka yang memberikan kesempatan, masa tetangga kota ini bahkan hanya dinikmati di kecamatan yang di kabupaten induknya saja itu baru ya sekitar 8% sampai 9%, beberapa sebagian besar kecamatannya belum. Padahal itu adalah merupakan penyanggah untuk di Kota Pontianak, sekelilingnya pembangunan perumahan cukup luas tapi air bersihnya masih terkendala. Ini tentu saya berharap di masa berikutnya ini bisa untuk dilakukan.

Kemudian terakhir sekali lagi saya berharap, Pak, jalan-jalan Inpres ini bisa pada saat berikut ini mungkin masih tetap jalan, itu bisa diakomodir lah beberapa daerah yang tadi masih belum bisa terserap pada periode ini.

Sekian.

Terima kasih.

Sekian, saya akhiri.

*Wallahul muwaffiq illa aqwamit tharieq,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam*  
Pak Syarif, makasih.

Kita kan disini dengan Pak Menteri sebenarnya kalau kita boleh berharap bicara umum saja dulu yang tentang kebijaksanaan. Nanti teknisnya kita nanti bicara sama para Dirjen supaya kita tidak terlalu termakan waktu panjang.

Baik.

Berikutnya Pak Suryadi, silakan Pak Sur.

**F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pak Ketua, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V. Bapak Menteri serta seluruh, Pak Dirjen, Pak Sekjen dan seluruh jajaran,

Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, tentu ini apresiasi saya ya kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran yang sudah mencapai wajar tanpa pengecualian opini BPK, dan ini berturut-turut, jadi ini suatu yang perlu kita apresiasi. Saya kira tidak salah kalau apapun yang dicapai oleh Pak Menteri baik secara langsung maupun tidak langsung, juga capaian dari Komisi V karena kita mitra.

Namun demikian, Pak Menteri, lebih detail ada beberapa rekomendasi yang menurut saya memang perlu diperhatikan secara khusus karena ada temuan-temuan yang berulang. Saya kira ini kalau ada kesalahan kemudian kita perbaiki ada kesalahan baru itu wajar, tapi kalau ada kesalahan-kesalahan yang berulang mungkin ini perlu ada *treatment* khusus ya. Secara detail nanti mungkin dengan Pak Dirjen dengan Pak Sekjen ya pada kesempatan yang lain. Tapi ini penting kami sampaikan dan saya berharap Pak Menteri dan seluruh jajaran tidak bosan-bosannya mendengar masukan dan kritik dari Komisi V ini untuk kebaikan kita bersama.

Yang kedua, terkait dengan realisasi anggaran pada tahun ini memang ada kenaikan dari periode yang sama pada tahun lalu, saya kira ini juga patut kita apresiasi. Tapi dalam catatan saya, khusus untuk program IBM ya, Infrastruktur Berbasis Masyarakat, program padat karya ini sepertinya ada keterlambatan dibanding tahun lalu. Kalau kumulatif seluruh program mungkin ada peningkatan realisasi anggaran dan realisasi fisik, tapi khusus IBM ini sepertinya ada kurang Pak Menteri. Padahal usulan-usulan dari masyarakat itu sudah masuk pada akhir tahun lalu, artinya lebih cepat masuk data-data daripada tahun sebelumnya. Tapi realisasinya sepertinya di lapangan ini masih apa progresnya belum secepat tahun lalu. Ya, kita berharap ini bisa lebih awal, ya demikian juga untuk tahun-tahun berikutnya. Karena infrastruktur berbasis masyarakat ini yang padat karya kan tidak saja targetnya untuk memperbaiki infrastruktur itu sendiri, tapi juga untuk lapangan kerja ya, mengantisipasi dampak covid yang cukup parah dua tahun terakhir, itu yang kedua.

Yang ketiga, terkait dengan proporsi anggaran ini, Pak Menteri. Kalau secara total dari pagu Kementerian PU yang 140 triliun, itu 18,9% ini ke IKN. Ya, menurut saya memang ini kurang proporsional, apalagi di salah satu Direktorat Jenderal misalnya di Dirjen Cipta Karya itu 41% anggarannya dialokasikan ke satu titik yaitu IKN. Spirit dari IKN ini kan keadilan pemerataan, oleh karena itu menjadi catatan kami agar alokasi anggaran untuk IKN ini jangan sampai mengurangi hak-hak daerah lainnya. Ya, seperti beberapa

aspirasi yang memang sudah kita usulkan dari hampir seluruh daerah termasuk di Dapil kami, sedikit sekali yang bisa diakomodir.

*Nah*, oleh karena itu, ini perlu menjadi catatan ya karena spirit dari IKN ini adalah pemerataan, *nah* jangan sampai justru tidak terjadi pemerataan itu. Karena proporsi anggaran yang tidak proporsional terutama di Direktorat Jenderal Cipta Karya 41% ke IKN dan 58 koma sekian persen ke seluruh Indonesia, ada 35, 36 provinsi ratusan kabupaten kota.

Ini penting menjadi catatan, Pak Menteri, supaya program-program daerah yang memang dibutuhkan itu juga jangan sampai terganggu dengan program di IKN. Termasuk juga capaian kita mengacu RPJMN ya, misalnya untuk sanitasi layak kan target RPJMN 2024 itu 90% capaian kita. Tapi saya lihat di RKP Kementerian PUPR target 2023, 85% dan 2024, 86%, jadi masih ada *gap* 4% dari target RPJMN. *Nah*, saya berharap target-target ini menjadi prioritas dan alokasi anggaran untuk IKN tidak mengurangi target-target itu di seluruh Indonesia. Ya, bagaimanapun kita juga akui bahwa IKN ini sudah ditetapkan, namun demikian harus ada proporsi anggaran yang memadai untuk seluruh daerah lainnya.

Berikutnya untuk daerah, beberapa program yang strategis di daerah khususnya kami di NTB. Kami maklumi karena keterbatasan anggaran memang tidak semua bisa dimulai ya terutama anggaran untuk fisiknya. Tapi yang menjadi catatan dan harapan kami adalah proses perencanaan tidak boleh terhenti, proses perencanaan tidak boleh terhenti, program-program yang memang membutuhkan anggaran besar. Misalnya di ujung timur NTB itu ada jembatan Lewamori itu cukup besar memang, kami maklumi walaupun belum mulai secara fisik tapi perencanaan harus tetap jalan, ada bendungan Mujur, Pak Menteri. Demikian juga jalan poros *bypass* dari *port to port* ya pelabuhan Lembar ke Kota Mataram, Kota Mataram ke Labuan Kayangan, dan ini sudah dijanjikan oleh Pak Jokowi ya secara lisan ya. Program-program ini kami maklumi walaupun belum ada anggaran, tapi proses perencanaannya harus tetap berjalan sehingga dalam setiap tahun itu perlu dianggarkan.

Secara khusus ada proyek yang sedang digagas ya untuk KPBU yaitu revitalisasi, irigasi, HND di Pulau Lombok Bagian Utara, Pak Menteri. Ini sepertinya molor dari *schedule* awal, ya saya tidak tahu ini apa kendalanya karena sebetulnya ini merupakan KPBU pertama untuk SDA Pak Dirjen ya, artinya ini supaya didorong. Karena di Pulau Lombok itu wilayah selatannya sudah cukup bagus dengan adanya Mandalika, tapi ada kecemburuan Pulau Lombok Bagian Utara ini belum tergarap. *Nah*, dengan adanya revitalisasi saluran HND irigasi di wilayah Lombok Bagian Utara dengan skema KPBU ini bisa dipercepat.

Termasuk beberapa usulan dari daerah yang Pak Menteri juga sudah sampaikan secara lisan, Pak Presiden juga. Penataan kawasan kantor masjid di Kabupaten Bima yang Bapak Presiden datang kemudian pasar di Bima. Termasuk juga sarana kampus swasta di Lombok, Pak, Institut Teknologi Lombok, yang Pak Menteri juga sudah sampaikan persetujuan secara lisan,



mungkin ini perlu ditindaklanjuti. Dan beberapa program yang besar ini maupun program-program yang kecil di daerah kadang-kadang kendalanya itu klasik, misalnya *readiness criteria*. *Readiness criteria* ini merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan dan itu tentu saja juga menjadi tanggung jawab kita di kementerian. Jangan sampai sering saya temukan di lapangan ketika petugas atau yang melakukan survei untuk mengecek kesiapan program ini *readiness criteria* itu mereka seolah-olah itu bukan tanggungjawabnya. Jadi datang cuma *checklist* gitu ya, ini ada ndak? Oh, tidak ada, tidak ada ini.

Yang kita harapkan, bagaimana petugas kita atau tenaga yang memang ditugaskan untuk mengecek persiapan-persiapan *readiness criteria* itu juga memandu, mengarahkan, memberi tahu apa yang perlu dilengkapi dan seterusnya gitu. Jangan datang cuma conteng-conteng pergi bahwa oh ini tidak siap. Artinya seolah-olah ini menjadi pekerjaan orang lain, padahal itu adalah bagian dari pekerjaan kita juga di kementerian sehingga harus ada tanggung jawab ketika itu tidak terpenuhi, apa yang harus dilakukan dan dibimbing supaya target waktu perencanaan sampai pelaksanaannya juga tidak molor. Kadang-kadang banyak molor program kita misalnya di padat karya itu juga karena itu.

*Nah*, oleh karena itu, harus ada tanggungjawab untuk membantu menyelesaikan semua persyaratan-persyaratan yang dituntut di dalam *readiness criteria* setiap program.

Jadi itu beberapa hal yang menjadi catatan kami, Pak Menteri. Ya terutama beberapa yang sudah disepakati atau disanggupi secara lisan oleh Pak Presiden maupun oleh Pak Menteri sendiri. Ya, revitalisasi pasar, kemudian di penataan kawasan di Bima dan bantuan untuk kampus swasta di Lombok, Pak Menteri.

Demikian, adapun detailnya nanti dengan Bapak Dirjen akan kita dalam lebih khusus.

Terima kasih, Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Makasih, Pak Sur.

Pak Harvey.

**F-PDI PERJUANGAN (HARVEY B. MALAIHOLLO):**

Terima kasih.

Pak Pimpinan,



Para Anggota Komisi V yang saya hormati, dan juga kepada Pak Menteri PUPR beserta jajarannya yang saya hormati,

Selamat siang.

Saya sedikit saja, Pak. beberapa waktu yang lalu saya menerima audiensi dari saudara-saudara kita di Ikatan Keluarga Besar Papua yang mewakili Suku Moi yang bertempat di Kabupaten Sorong, daerah pemilihan saya, Pak. Mereka mewakili Suku Moi ini untuk memohon menyampaikan ini kepada Bapak Menteri. Pak, mereka memohon minta rumah khusus, Pak. Memang saya juga menerangkan kepada mereka, bahwasannya ada kebijakan dari menteri khususnya, bahwa program rumah khusus ini ditujukan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Tetapi melihat kondisi rumah dari saudara-saudara kita di Sorong ini dari suku asli Moi ini sangat memprihatinkan, Pak.

Saya hanya ingin pada kesempatan ini memohon untuk menjadi pertimbangan Pak Menteri untuk memberikan rumah khusus untuk saudara-saudara kita di Sorong ini yaitu suku Moi. Nanti apa lokasi yang tepatnya dan data-data yang saya terima ini akan saya sampaikan di akhir rapat ini kepada Pak Menteri secara khusus.

Terima kasih, Pak Menteri, terima kasih juga Pak Pimpinan. Itu saja dari kami. Bagaimana? Oh, begitu, oke kalau begitu.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Langsung.

**F-PDI PERJUANGAN (HARVEY B. MALAIHOLLO):**

Iya, makasih.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Fotonya, fotonya mana? *nggak* ada foto? penyanyi sama penyanyi ini.

Makasih, Pak Harvey.  
Pak Ruslan.

**F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabakaratu.*

Yang kami hormati Pimpinan dan seluruh teman-teman Komisi V,  
Yang kami banggakan Bapak Menteri dan seluruh para jajaran yang hadir,

Pertama, tentunya kami mengapresiasi juga atas capaian kinerja Bapak Menteri yang sangat luar biasa sehingga apa yang dipaparkan oleh Bapak Menteri tadi ini sangat membanggakan bagi kita semua.

Yang kedua adalah saya masuk target prioritas 2024, Pak Menteri. Di sini tentunya sama-sama kita tahu yang bahwa PON untuk ke depan ini dilaksanakan di Aceh dan Sumut. Maka oleh karena itu, ingin sekali lagi dan juga mungkin Bapak Menteri masih ingat disaat ada kenduri kebangsaan kemarin, Pak Menteri, yaitu yang dihadiri oleh Bapak Presiden sendiri, yaitu ada stadion yang namanya Cot Gapu Bireun, Pak Menteri, mungkin Bapak Menteri masih ingat itu. Itu perlu Bapak Menteri untuk tahun ini ataupun tahun depan, coba kita prioritaskan Pak Menteri untuk kita bangun sesuai dengan janji Bapak Presiden kemarin waktu datang ke Bireun.

Dan juga hal-hal yang lain mungkin kami dari Provinsi Aceh tentunya ada yang sudah masuk dan juga satu *nih* yang sangat sakral yaitu tumbuh niat baik yaitu Bapak Presiden ingin menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang terjadi disaat konflik antara GAM dengan pusat itu adalah dibentuk yaitu satu rumah, yaitu rumah Amanah ini ya. Ini sudah tertuang, ini sangat kami banggakan dan kami apresiasi atas niat baik ini semua.

Dan tentunya yang lain-lain kami akan memperdalamkan nanti disaat kami dengan Bapak Dirjen dan juga Ibu Dirjen. Mungkin itu saja Pak Ketua, yang selebihnya nanti akan saya serahkan saja secara langsung.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Itu yang benar itu yang benar.

**F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P.):**

*Nah.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Biar, kita terpakai waktu yang baik.

**F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P.):**

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Mau serahkan atau nanti menyusul? Sama Pak Dirjen ya.

Baik.

Bu Lasmi silakan Bu Lasmi, Bu Lasmi silakan Bu. Oh, mau serahkan dulu silakan. Ya, silakan Bu Lasmi.

**F-PD (LASMI INDARYANI, S.E.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V dan teman-teman Komisi V,  
Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran,

Yang pertama, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Basuki. Pak Basuki sudah memperhatikan wilayah saya yaitu Dieng, pengembangan pariwisata di kawasan wisata dataran tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara dan juga Dapilnya Pakde Sudjadi, Wonosobo. Kami sangat mendorong untuk hal itu bisa cepat terealisasi karena penataan kawasan tersebut akan mampu menghadirkan para wisatawan untuk datang ke kawasan Dieng sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Sedikit promosi boleh Ketua ya. Jadi Dieng ini biasa disebut negeri di atas awan dan kalau saya menyebutnya adalah Eropa-nya Jawa Tengah, Ketua. Jadi, kalau misalnya teman-teman untuk daripada ke Eropa ya untuk menikmati udara dingin bisa ke Dieng. *Nah*, untuk bulan Agustus ini akan ada Dieng *Culture Festival* disana terkenal dengan ritual pemotongan rambut gimbal dan juga biasanya ada pesta lampion. *Nah*, silakan datang atau mungkin Komisi V bisa kunjungan kerja, Ketua, di Dieng, tiketnya ya, Ketua ya siap saya siapin ya.

Saya juga mendorong untuk Kementerian PUPR untuk lebih banyak lagi program padat karyanya, Pak Menteri. Jadi, kalau bisa benar tadi seperti teman kami Pak Suryadi, kalau bisa merata jangan hanya di IKN saja, Pak Menteri, tapi juga daerah seluruh Indonesia harap diperhatikan dan semoga adil dan juga semoga merata programnya terutama di daerah-daerah yang ada Komisi V nya. Karena otomatis kami duduk disini karena memang daerah-daerah kami sangat membutuhkan program-program dari Komisi V terutama mitra kami adalah Kementerian PUPR. Dan setiap saya keliling Dapil yang terbanyak diminta adalah PISEW, Pak Menteri. Jadi hampir semua desa itu meminta perbaikan jalan antar desa, jadi kalau bisa mungkin untuk PISEW-nya diperpanjang, setuju ya, Pak Tamanuri?

**F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):**

Setuju, setuju.

**F-PD (LASMI INDARYANI, S.E.):**

Iya.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait usulan dari masyarakat kami, saya cepat saja nanti saya akan menyerahkan juga berkas kepada Pak Menteri.

Yang pertama adalah untuk penyediaan Rusus (rumah khusus) bagi korban bencana tanah longsor di desa Aribaya Kecamatan Pagentan, Banjarnegara. Karena sampai saat ini sudah berulang kali, Pak Menteri, terjadi tanah longsor tidak hanya sekali tapi sudah berulang-ulang dan menyebabkan banyak rumah rusak dan penghuninya juga harus diungsikan.

Usulan yang kedua mengenai program peningkatan kapasitas air baku melalui pembangunan *intake* pada sumber mata air Kaliamis Karangobar dengan kapasitas 30 liter/detik. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian PUPR karena sudah membangun SPAB Kali Ori yang sudah memenuhi kebutuhan air baku sebesar 100 liter/detik. Tetapi kebutuhannya masih banyak, Pak Menteri, kebutuhannya 430 liter, saat ini baru ada 197 liter.

Dan yang ketiga adalah usulannya untuk IPA/Instalasi Pengolahan Air Minum. Kami mengusulkan IPA dengan kapasitas 50 liter/detik yang berfungsi akselerasi dengan pembangunan SPAB Kali Ori yang sudah ada.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Ini Kali Ori yang dimana ya, Bu?

**F-PD (LASMI INDARYANI, S.E.):**

Kali Ori Banjarnegara, Pak.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Oh, saya kira di Pati.

**F-PD (LASMI INDARYANI, S.E.):**

Iya, mungkin itu singkat saja, saya izin langsung menyerahkan, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Langsung, iya. Maaf ini Pak Menteri mungkin agak lama sedikit ini karena menyerahkan-menyerahkan ini.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan, Pimpinan.

Saya setengah menit ya tambah sedikit setengah menit saja.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Kurang tadi ya kurang tadi? Bisakah terakhir nanti Pak Dewo? Sekarang, mau minta sekarang? Seizin teman-teman ya, Pak Dewo minta 5 menit..., apa 5 detik..., 5 menit..., setengah menit, silakan.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Mumpung ingat, Pimpinan, karena Bu Lasmi bicara soal Dieng kemudian Pak Menteri tadi juga menyampaikan soal Dieng. Saya hanya ingin memberikan masukan saja kepada Pak Menteri bahwa Dieng itu sebenarnya sudah bagus, syukur ditambah penataan kawasan akan menjadi lebih bagus lebih eksotis lagi tapi sesungguhnya secara alam itu sudah eksotis dan itu luas sekali. Persoalan di Dieng menurut hemat saya hanya masalah akses jalan, Pak. Akan lebih bagus kalau itu dikoneksikan antara Dieng dengan jalan tol.

Saya pikir itu tidak akan kalah dengan super prioritas destinasi wisata yang lain apabila memang dibuka akses. Jadi, bisa memenuhi unsur prioritas nasional yang PN 1, Pak Menteri, ini masukan saja. Buat jalan baru dari jalan tol ke Dieng, saya yakin Dieng akan menjadi primadona untuk super destinasi wisata,

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Makasih, Pak Dewo.

Berikutnya mohon maaf Pak Iqbal duluan karena Pak Iqbal ada urusan keluar. Jadi kita persilakan unsur Pimpinan.

Pak Iqbal, silakan.

**F-PPP (H. MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.COM./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Iya.

Terima kasih Pak Ridwan, Pak Ketua atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini mohon izin nih teman-teman Komisi V hari ini saya minta duluan karena nanti ada kegiatan partai *nih*, Pak Menteri, jadi saya minta izin duluan.

Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen dan seluruh jajaran dari Kementerian PUPR,  
Yang saya hormati Pimpinan,  
Teman-teman Anggota Komisi V,

Ada beberapa hal, Pak Menteri, yang ingin saya sampaikan yang pertama berkaitan dengan anggaran. Kita tahu bahwa anggaran PUPR itu salah satu anggaran yang terbesar di kementerian dan lembaga. Dan saya sangat mengapresiasi dengan capaian anggaran yang bulan Juni sudah mencapai 22,70%. Tetapi tentu kita harus waspada karena bulan Juni ini sudah pertengahan akhir tahun, sekitar enam bulan lagi akhir tahun. Mudah-mudahan target capaian anggaran itu bisa tercapai, Pak Menteri.

Kemudian juga yang kedua tentang terkait dengan program padat karya, ini di halaman 14 itu program padat karya targetnya itu sebanyak 713.000 orang tetapi sampai Juni itu baru mencapai 141.000 orang, Pak Menteri, artinya baru 19%. Kami berharap agar program padat karya ini bisa terealisasi sebanyak mungkin sesuai dengan harapan kita karena memang padat karya ini merupakan program yang dinanti-nanti oleh Masyarakat, Pak Menteri, dari masyarakat untuk masyarakat karena masyarakat sendiri yang mengerjakannya, itu yang kita harapkan. Kemudian juga kita harapkan tahun 2024, program-program padat karya ini bisa lebih banyak lagi dan mudah-mudahan bisa terealisasi Januari untuk tahun 2024 nanti.

Kemudian juga tentang jalan, Pak Menteri, Inpres Jalan ini, kami sangat senang sekali dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Beliau sudah berkunjung ke beberapa provinsi kemudian dengan sigap Pak Menteri sigap dan tanggap kemudian mengeksekusi akan memperbaiki jalan-jalan di beberapa provinsi, tadi Pak Tamanuri katakan tadi di Lampung kemudian Jambi, setahu saya kemudian Sumatera Utara. Harapan kita di beberapa provinsi lainnya akan segera terealisasi perbaikan jalan terutama jalan-jalan nasional dan jalan provinsi. Apalagi jalan provinsi *nih*, Pak Menteri, jalan provinsi itu banyak sekali yang rusak di beberapa provinsi itu harapan kita termasuk juga di Sumatera Barat, Pak Menteri.

Kemudian juga ini yang terakhir ini tentang program, Pak Menteri. Kami tentu dari Komisi V berterima kasih atas program-program yang telah kami di kami bawa ke Dapil, banyak sekali program-program yang berkaitan dengan padat karya dan masyarakat sangat antusias sekali dengan program-program tersebut. Tetapi juga dengan keberadaan kami di Komisi V ini, tentulah banyak sekali teman-teman, Pak Menteri. Teman-teman baik teman-teman dari partai atau kepala-kepala daerah yang mungkin bukan saya saja, teman-teman yang lain juga yang bertemu dengan kami meminta bantuan kepada kami untuk memberikan proposal kepada Pak Menteri agar daerahnya juga diberi bantuan. Dan biasanya dari beberapa daerah di luar Dapil itu lebih banyak mereka meminta bantuan Rusunawa, pendidikan.

Kemudian juga dengan terbitnya Inpres Jalan, tentulah banyak kepala-kepala daerah itu, bukan hanya dari Dapil saya, Pak Menteri, dari luar Dapil

juga itu datang ke saya untuk memohon bantuan memberikan proposal kepada Pak Menteri bagaimana agar daerah mereka itu bisa cepat terealisasi. Tentu kami, teman-teman dan saya juga tentu berharap agar daerah pemilihan kami, kami utamakan, itu sudah pasti. Tetapi sebagai Anggota DPR yang Tupoksi kami dari Sabang sampai Merauke, tentu kami juga tidak bisa mengabaikan jika ada usulan baik dari beberapa kepala daerah di luar Dapil kami atau dari teman-teman baik itu satu partai atau tidak partai yang meminta bantuan ke kami bagaimana agar mereka juga bisa mendapatkan program-program dari Kementerian PUPR, dan itulah yang terjadi juga kepada saya dan kepada teman-teman yang lain.

Oleh karena itu, atas seizin Pak Ridwan, saya pada kesempatan ini, Pak Menteri, mohon izin untuk juga memberikan proposal kepada Pak Menteri Basuki. Ada satu proposal Pak Menteri ini merupakan titipan dan mudah-mudahan kami berharap agar ini bisa menjadi perhatian dari Pak Menteri.

Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan.

*Wabillahitaufik walhidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Waalaikumsalam.*

Silakan, Pak Iqbal.

Ya, Bu Cen Sui Lan.

**F-PG (CEN SUI LAN):**

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan,  
Teman-teman Anggota Komisi V,  
Yang saya hormati Pak Menteri dan jajaran,

Pak Menteri, masyarakat Natuna dan Serasan mengucapkan terima kasih karena kunjungan Pak Menteri ke Serasan dan juga Pak Dirjen Perumahan karena saat ini rumah yang dibangun itu sudah hampir selesai, cuma ada sedikit yang dikomplain rumahnya terlalu berdekatan, masyarakat kan biasa tinggalnya berjauhan padahal lahan besar, tapi *alhamdulillah* semua mengucapkan terima kasih. Juga Pak Menteri datang Serasan mendapatkan jalan daerah yang langsung ditindaklanjuti.

Pak Menteri, saya melihat rencana pembangunan bendungan. Saya ingin mengajukan juga karena selama ini Kepri itu tidak pernah ada. Saya mau mengajukan bendungan Busung karena itu untuk mengakomodir kekurangan air di 2 kabupaten dan 1 kota, itu untuk memenuhi pemenuhan air baku di

Tanjung Pinang, Batam dan Bintan. Untuk Tanjung Pinang sendiri, mungkin pemenuhan air baku yang saat ini tersedia hanya sampai dua tahun ke depan. Karena itu sangat diperlukan, mohon nanti dibantu pembangunan waduk Busung. Juga untuk yang di Lingga, Pak Menteri, daerah Kepri itu kan geografisnya berbeda.

Artinya kita bukan hanya memerlukan jalan, kita juga memerlukan jembatan, jembatan untuk konektivitas dua pulau. Saya ingin mengajukan jembatan Pulau Senayang dan Sebangka, karena pulau Senayang itu disitu pusat pemerintahan daerahnya sudah tidak memadai sudah terlalu sempit karena itu beberapa kantor-kantor pemerintahan dipindahkan ke Sebangang, cuma mau kesana itu harus naik kapal, sangat tidak efisien. Dengan kita membangun jembatan itu akan membuka akses daerah, membuka meningkatkan pusat perekonomian dan juga untuk pariwisata. Jadi saya minta Pak Menteri tolong dibantu untuk pembangunan jembatan Pulau Senayang dan Sebangka di Kabupaten Lingga.

Juga Pak Menteri ada yang lain lagi yang saya mau minta, Tanjung Pinang. Daerah tersebut itu ibukota provinsi selalu mengalami banjir besar. Terakhir itu di daerah sekitar bandara banjirnya sampai 1,5 meter dan menenggelamkan daerah di sana. Itu perlu penanganan khusus, artinya saya perlu *folder* penanganan banjir yang besar. Saat ini mungkin ada di daerah Jalan Pemuda itu tidak cukup. Jadi saya akan minta untuk pengendali banjir kawasan Srikaton Tanjung Pinang. Mungkin Pak Jarot nanti saya minta mohon diprioritaskan karena itu kan ibukota provinsi. Jadi ada beberapa hal yang saya minta prioritas, Pak Menteri, tolong dibantu. Yang lain-lain tidak ada.

Terima kasih Pak Menteri.  
Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Makasih.

Bagaimana, sekarang sudah hampir jam setengah satu, kita *break* dulu? Oh, Pak Aras dulu?

Silakan Pak Aras karena mau ke DPP katanya, silakan Pak Aras.

**F-PPP (DR. H. MUH. ARAS, S.PD., M.M.):**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirahim.*  
*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Kawan-kawan Anggota Komisi V,



Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh Eselon I dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Pertama-tama, tentu kami mengapresiasi capaian WTP oleh Kementerian PUPR. Ini luar biasa penggunaan anggaran yang cukup tinggi lalu bisa mengelola dengan baik, ini suatu prestasi yang luar biasa bagi kami.

Yang kedua adalah terkait dengan beberapa program yang tentu kami berharap bahwa tahun 2024 ini menjadi pemerintahan apa penganggaran terakhir untuk 2024, masa jabatan dari Pak Presiden kita. Tentu kita berharap bahwa semua bisa terselesaikan dengan baik, tentu tidak meninggalkan apapun di kemudian hari. Kemudian hasil pemeriksaan semester I juga cukup bagus, hanya saja capaian yang sampai hari ini yang kisaran sampai 27%, mudah-mudahan di akhir tahun bisa tuntas sesuai dengan harapan kita.

Yang selanjutnya adalah kami mengingatkan kembali bahwa di 2021 kemarin kami selalu menyampaikan kepada Pak Menteri untuk penyelesaian jalan di jalan nasional di Sulawesi Selatan yang tentu rusak parah dan *alhamdulillah* sudah tertangani kurang lebih ada sekitar 20 kilo, Pak Menteri, hanya saja memang penyelesaian tahun ini kurang lebih 15 kilometer, dan masih tersisa kurang lebih 12 kilometer untuk tahun depan. Yang keduanya adalah ini kan dari jalan daerah yang lebar jalan dan jembatannya hanya 3 meter, mohon untuk diprogramkan juga di tahun 2024 terkait dengan perbaikan jembatannya.

Jadi ini di akhir tahun ini menurut rencana dari Ka.balai Sulawesi Selatan itu akan dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar bertonase tinggi yang akan melewati dari Makassar sampai ke menyeberang ke Sulawesi Tenggara, oleh karenanya mobil-mobil besar itu akan lewat di sana. *Nah*, sementara jembatan yang ada belum tentu kemampuan daya muatnya untuk kendaraan besar belum mampu untuk itu. Oleh karenanya, mohon menjadi perhatian, jangan sampai kedepan akan menimbulkan kecelakaan yang fatal buat pengguna moda transportasi darat.

Kemudian yang kedua adalah hasil kunjungan kerja kami kemarin Komisi V di Kabupaten Maros. Itu akses jalan itu kan hanya satu jembatan, Pak, dari Makassar ke jalur Pare-Pare dan jalur ke Bone. Pemerintah daerah mohon itu ditambah satu jembatan dan pembebasan lahannya sudah selesai, itu akan mengurai kemacetan yang ada di Kabupaten Maros. Yang kedua terkait juga dengan banjir yang setiap tahun minimal dua kali yang terjadi di Maros, juga perlu perhatian khusus dari kita dan sudah disampaikan juga pada saat itu terkait dengan pembangunan atau pembuatan *sheet pile* untuk sungai Maros yang memang hampir minimal dua kali dalam setahun meluap, Pak. *Nah*, mudah-mudahan dengan adanya pembangunan itu bisa mengurangi banjir yang akan terjadi di sana.

Kemudian selanjutnya, Inpres yang telah diprogramkan oleh Pak Menteri, Pak Presiden, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Oleh

karenanya, pemerintah daerah banyak menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri atas Inpres yang diturunkan di berbagai daerah.

Kemudian yang selanjutnya, kami tentu masih menginginkan padat karya ini tetap harus dilanjutkan agar tentu masyarakat yang kalangan menengah ke bawah ini bisa betul-betul menikmati apa yang menjadi kegiatan-kegiatan dari Kementerian PUPR, khususnya untuk miskin ekstrim yang BSPS nya, Pak Menteri, ini banyak pengalaman kemarin. Ada beberapa desa yang kita usulkan untuk BSPS itu tidak bisa dijalankan karena data-data yang menjadi acuannya ini tidak akurat. Jadi ada beberapa data yang terpaksa harus dipindahkan ke desa yang lain karena pada saat penggantian harus juga yang ambil dari data itu. Sementara semua data yang di daerah itu sudah tidak ada yang memenuhi syarat terkait dengan miskin ekstrim. Oleh karenanya, ini pengambilan sampel datanya harus betul-betul valid.

Kemudian sama halnya disampaikan tadi oleh Pimpinan bahwa ada beberapa padat karya terutama BSPS yang berada di luar Dapil yang mana tentu kami sudah buat juga surat dari fraksi agar bisa dijalankan, ada beberapa titik yang belum bisa dilaksanakan karena beberapa alasan. Mudah-mudahan ini dipermudah sehingga seluruh aspirasi dari teman-teman fraksi bisa terselesaikan.

Barangkali itu yang sempat saya sampaikan.

Terima kasih atas perhatian kita, sekian.

*Wallahul muwaffiq illa aqwamit tharieq.  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

Sekali lagi sekarang tinggal masih ada 16 yang belum dari 11 yang sudah selesai. Jadi barangkali kita Ishoma dulu, Pak Menteri.

Setuju Pak bagaimana Ishoma 30 menit ya.

**F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

Pimpinan, *break* dulu, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Iya.

**F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

Iya *break*.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Break* 30 menit ya, mau satu jam atau 30 menit?

**F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

30 menit, Pimpinan, *break* dulu

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Ya, supaya Pak Menteri cepat balik.

Ya, kita skors selama 30 menit. Kita masuk kembali jam 1.

**(RAPAT DISKORS SELAMA 30 MENIT)  
(RAPAT DISKORS PUKUL 12.25 WIB)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

---

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

**(SKORS DICABUT PUKUL 13.20 WIB)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Selamat datang Pak Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI bersama kita pada kesempatan ini,

Kemudian kita lanjut pada kegiatan kita yaitu masih pendalaman Anggota yang terhormat.

Gak ada Boyman ya?  
Yang ada Pak Irwan.  
Silakan Pak Irwan.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Masih berapa lagi?

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Sudah habis ya?

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Masih ada 15, Pak.

**F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pak Rahmat Gobel,  
Pimpinan Komisi V serta rekan-rekan Komisi V yang saya banggakan,

Pertama-tama tentu, oh iya,  
Yang saya hormati Pak Menteri PUPR, Pak Dirjen, Pak Direktur serta seluruh jajaran Kementerian PUPR,

Pertama-tama, saya mengapresiasi ya capaian WTP Kementerian PUPR. Ini tentu bagian dari kerja keras etos kerja yang kuat untuk mendapatkan WTP dari audit BPK. Kemudian selamat juga *nih*, saya lihat ada *link* berita Pak Bas masuk bursa Cawapres. Ya, tentu juga itu hasil kerja-kerja yang luar biasa dari Pak Menternya selama 9 tahun ini, tentu layak kita apresiasi.

Komitmen untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur IKN tadi tergambar ya dari paparan Pak Menteri terutama penyelesaian pembangunan istana Presiden, termasuk bendungan, jalan dan jembatan serta embung dan beberapa infrastruktur pendukung IKN. Kami berharap ini bisa tuntas, ini juga selain harapan masyarakat Kaltim juga harapan rakyat Indonesia untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. *Nah*, cuma mungkin ada sedikit pertanyaan terkait usulan penambahan 8 triliun itu untuk IKN, apakah sudah masuk 2023 atau sudah masuk dalam pagu anggaran dan program 2024?

Kemudian terkait hasil rilis bank dunia terkait *logistic performance index* kita turun ya dari peringkat 46 turun jadi 63. *Nah*, saya melihat ke depan agar salah satu apa Namanya sektor yang menjadi penentu yang sangat dominan adalah tentu pembangunan infrastruktur. Harapannya pembangunan konektivitas infrastruktur terkait dukungan logistik ini performa logistik ini agar mengedepankan efisiensi biaya logistik gitu tujuannya. Jangan sampai kemudian Pembangunan-pembangunan infrastruktur kita tidak mendukung terutama ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Harapan kita infrastruktur yang luar biasa dibangun 9 tahun ini mampu kemudian mengurangi beban biaya logistik yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi gitu.

Kemudian sedikit saya mungkin agak membahas ya terkait permasalahan diksi mungkin yang terkait pembangunan jalan agar sekaligus mengakhiri perdebatan di masyarakat. Bahwa pembangunan jalan ini di dalam Pasal 29 ayat (2) UU Jalan adalah terkait pembangunan jalan baru juga preservasi. Jadi masyarakat juga harus memahami bahwa pembangunan jalan itu bukan hanya pembangunan jalan baru, karena justru beban anggaran PUPR yang terbesar justru banyak di preservasi. Yang mana preservasi ini justru timbul karena adanya perubahan status jalan daerah menjadi jalan nasional, ini juga APBN sangat besar dan sangat panjang jalan kita dari perubahan status jalan daerah ke jalan nasional. Bahkan beban biayanya tiap tahun melakukan preservasi lakukan preservasi mulai dari rekonstruksi, rehab sampai dengan pemeliharaan rutin ini cukup besar gitu *loh*. *Nah*, menurut saya

*sih* ini juga bagian daripada *legacy* siapapun pemerintahan-pemerintahan berikutnya dan ini kerja keras Kementerian PUPR siapapun Presidennya.

Kemudian terkait Inpres 3 Tahun 2023, tentu kita mengharapkan ini saya pikir Inpres ini datang karena adanya revisi UU Jalan hasil kerja kita di Komisi V. Dan tentu harapan kita apa namanya sosialisasi terkait Inpres ini kemudian apa Namanya dalam tanda kutip festivalisasi penanganan percepatan konektivitas jalan daerah ini bisa melibatkan kawan-kawan Komisi V, kemarin sudah ada di Lampung, Sumatera Utara, Jambi. Saya pikir semua Dapil kawan-kawan Komisi V juga ada Inpres Jalan Daerah-nya dan kita bersama-sama apa namanya Pak Presiden, Pak Menteri bisa kemudian memperlihatkan komitmen perjuangan kita ke masyarakat bahwa intervensi APBN terutama terkait konektivitas jalan daerah itu bisa dilakukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini.

Kemudian yang terakhir, saya ingin sekedar mengingatkan Pak Menteri, katanya kan janji itu hutang. *Nah*, pada proses pembahasan APBN 2023, kami tentu sudah menyampaikan apa yang telah kita sepakati di tengah masyarakat. Saya agak *nggak* bisa tidur gitu *loh* ditagih masyarakat ini ada tiga, yang lainnya sudah oke ya, artinya di Bina Marga, Cipta Karya, SDA juga di Perumahan. Tapi ada tiga program yang ini yang sampai sekarang belum ada anggarannya, padahal sudah kita sepakati kemarin di pembahasan APBN 2023 dan sudah tersosialisasi baik oleh eksekutif, oleh walikota bupati-nya, masyarakatnya juga tahu tapi ini belum.

Pertama, saya minta maaf ya, Bu Dirjen, terkait Kotaku skala kawasan di Bontang ini sudah dilaksanakan dulu kita tinggal tuntaskan dan dilaksanakan juga oleh Kementerian PUPR dan ini sangat mendukung juga sektor pariwisata juga penyelesaian masalah *stunting* di kawasan Selambai di Lok Tuan Kota Bontang ini. Saya berharap ini segera ada anggarannya terkait program lanjutan Kotaku skala kawasan di Kota Bontang.

Kedua, ini sangat penting sekali lanjutan pembangunan sumber air baku di Sangkulirang. Ini juga kita sudah setuju dan ini sudah dibangun tahun lalu, kalau kemudian tidak ada lanjutannya tahun ini, itu tidak fungsional dan itu pasti mangkrak karena baru galian tanah dan lain-lain. Saya berharap ini dilanjutkan sehingga permasalahan puluhan tahun masalah air bersih di Sangkulirang ini *InsyAllah* bisa tuntas dengan lanjutan ini dan do'a masyarakat Sangkulirang bersama seluruh keluarga besar Kementerian PUPR.

Kemudian yang terakhir, terkait permasalahan dukungan untuk pertanian. Di sini ada sawah ribuan sawah *existing*, dulu PUPR bangun rehab *eh* bangun daerah irigasi di Cipta Graha ini dan sekarang sudah retak-retak jaringan irigasinya putus ya, saya pikir memang harus ada lanjutan rehab dan ini juga belum ada anggarannya. Ya, di tengah permasalahan keterbatasan anggaran, saya pikir tadi luar biasa ya dana pembangunan IKN tetapi Kaltim itu bukan hanya IKN. Bagaimanapun *existing* ada 10 kabupaten/kota di Kaltim yang tetap butuh intervensi APBN dan kami berharap ini bisa menjadi perhatian Pak Menteri, kami sangat mohon, pada kesempatan ini saya sangat mohon

agar tiga yang ketinggalan ini, yang lainnya *alhamdulillah* sudah berjalan *nggak* ada masalah ini bisa ada anggarannya tahun ini.

Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pimpinan, saya mohon maaf ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf.

*Wabillahitaufik walhidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Waalaikumsalam.*

Makasih, Pak Irwan.

Pak Boyman.

**F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):**

Baik.

Terima kasih.

Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Bapak Menteri PUPR, Bapak Sekjen, Para Dirjen yang saya hormati,

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jadi dari beberapa kesempatan kalau pujian-pujian untuk Menteri PUPR ini sudah tidak terhitung lagi, Pak. Artinya saya tidak perlu lagi mengucapkan pujian karena berkaitan masalah serapan anggaran kemudian hasil evaluasi berkaitan anggaran memang PUPR ini memang tidak diragukan lagi sudah berapa kali WTP, tetapi memang harus diucapkan selamat buat PUPR, karena sangat-sangat memberikan manfaat yang luar biasa untuk bangsa kita ini khususnya di Dapil saya di Kalimantan Barat. Walaupun belum semuanya perjuangan kami itu terkabulkan, tetapi sebagian besar sudah terlaksana.

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Menteri, pertama berkaitan dengan masalah Inpres. Inpres ini, kami berterima kasih sekali, tidak saja masyarakat tetapi kepala daerah di Kalimantan Barat juga berterima kasih atas masuknya Inpres ini paling tidak bisa melakukan perbaikan-perbaikan jalan yang sangat-sangat prioritas yang dilalui oleh masyarakat umum. Tetapi harapan saya Inpres ini tentu tidak bisa sekaligus, Pak, mungkin tahap pertama tahap keduanya jangan sampai terputus karena kalau terputus perbuatan baik kita akan sirna karena masih ada yang belum terlaksana, itu satu.

Kedua Pak, kedua berkaitan dengan perencanaan anggaran, Pak, masalah padat karya di jembatan gantung. Itu biasa, Pak, itu jembatan gantung

itu antara perencanaan dengan penganggarnya itu tidak sesuai, Pak. Maksudnya jembatan gantung biasa ada akses jalannya, akses jalannya tidak dianggarkan, sehingga jembatan tersebut agak susah dilalui untuk dianggarkan kembali dengan daerah biasanya tertunda karena kemampuan keuangan daerah itu.

Kemudian yang ketiga itu masalah miskin ekstrim agar dievaluasi agar kami bisa melaksanakan kegiatan bantuan untuk BSPS ini benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan.

Selanjutnya, berkaitan dengan masalah Sekolah Dasar/SD, Pak, di daerah kami Kalimantan Barat sudah banyak sekali yang rusak berat yang tidak bisa ditempati untuk bersekolah. Artinya mohon usulan kami yang 2023 belum terlaksana di 2024 tolong bisa dipertimbangkan untuk dilaksanakan.

Kemudian, Pak, berkaitan dengan masalah pembangunan jalan nasional yang ada di sungai Kelik Tayap, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat agar berkelanjutan, Pak, sampai selesai karena jalannya sudah tidak banyak lagi tinggal sedikit, harapan saya jangan terputus sehingga jalan yang sudah bagus dan mulus itu bisa nyampai dari sungai Kelik Tayap masyarakat bisa menikmati dengan nyaman.

Yang terakhir, Pak, yang terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih masyarakat Kabupaten Ketapang Kecamatan Pesaguan dan Kendawangan, *Insy Allah* tidak lama lagi akan dilelang Inpres Jalan Kecamatan Pesaguan Kecamatan Kendawangan dan Kabupaten Ketapang yang saya perjuangkan dari sejak awal masuk di sini sudah terealisasi dan akan dilelang oleh PUPR,

Terima kasih.

*Billahitaufik walhidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

Makasih, Pak Boyman.

Pak Dedi Wahidi, silakan Pak.

**F-PKB (H. DEDI WAHIDI, S.PD.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ketua, Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,  
Pak Menteri beserta seluruh jajaran,



Pertanyaan tadinya banyak tapi sudah diselesaikan tadi di ruangan Pak Menteri, tinggal saya sedikit, yaitu pertama mengenai Irdes ,Pak, P3TGAI, ada 9 desa yang setelah disurvei tidak memenuhi syarat karena desa itu tadah hujan lalu dipindahkan ke desa yang lain tapi sampai sekarang belum terealisasi, Pak.

Yang kedua, terima kasih, Pak Menteri, itu perbaikan tanggul bendungan Cipancu di Argolis, Pak, sudah selesai, tapi sepertinya masih sangat perlu untuk dinormalisasi, Pak Menteri, karena bendungannya sudah sangat dangkal. Pak Menteri kalau, *nggak* salah 2 tahun lalu ketika jebol ke sana.

Selanjutnya di Bina Marga, tadinya ada banyak ini tinggal satu, Pak, yaitu jembatan gantung, Pak. Jembatan gantung ini tinggal *finishing*, Pak, tapi *nggak* dikerjakan malah ninggalin hutang di toko material terdekat, Pak, sebanyak atau sebesar 135 juta lebih ditinggal, Pak, PT-nya Sarimas Indah Sejahtera, Pak.

Kemudian saya kira habis, Pak, kecuali hari Senin, Pak, tanggal 12, Pak, ada Kunsfik ke Indramayu, saya mohon dihadirkan direktur-direktur terkait, Pak. Kebetulan beberapa direkturnya itu mantan kepala balai di sana sehingga tahu lapangan, Pak, yakni Direktur Irigasi dan Rawa, Pak, ini mantan kepala balai di sana, Pak. Kemudian Direktur Sungai dan Pantai, Pak, ini juga mantan direktur di sana. Mohon ditugaskan, Pak, karena Indramayu daerah lumbung padi nomor 1 Indonesia, Pak. Kemudian panjang pantainya 147, banyak titik-titik yang abrasi bahkan rob naik ke rumah tiap hari, Pak, Sehingga itu perlu relokasi rumah, Pak, karenanya maka mohon juga dihadirkan Direktur Perumahan, Pak.

Dan terakhir karena di sana itu ada embarkasi haji Jawa Barat, Pak, sehingga perlu mendesak adanya jalan tol dari bandara Kertajati ke Indramayu. Oleh karenanya maka dimohon ditugaskan Direktur Jalan Tol, Pak.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq illa aqwamit tharieq,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Waalaiikumsalam.*

Makasih, Pak Dedy.

Pak Sumail.

**F-GERINDRA (IR. SUMAIL ABDULLAH):**

Makasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,  
Pak Menteri beserta segenap jajaran Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan  
Semua yang saya hormati dan saya muliakan,

Sedikit, Pak Menteri, mungkin yang kami sampaikan bahwa hasil pengawasan kami terhadap rencana kerja dan program kaitannya dengan proyek strategis nasional. Saya akan memulai dari pekerjaan besar yang ada di Bali tol Mengwi ke Gilimanuk, Pak. Setelah *groundbreaking* 2022 terkesan sangat lambat hingga sekarang, bahkan saya mendapatkan informasi tiga bulan ini sudah mandek pengerjaannya karena penyedia-penyedia jasa yang berkaitan dengan BUMN itu karena *cashflow*-nya terganggu, Pak, barangkali ini bisa dibuka kontraktor-kontraktor lokal yang punya kemampuan untuk bisa terlibat di dalam proyek strategis nasional tersebut.

*Nah*, sebelum mengarah kepada tiga catatan kami, tentu saya perlu apresiasi terhadap capaian-capaian yang telah diraih sehingga Kementerian PUPR ini mendapatkan WTP setiap tahun walaupun ada 32 temuan dan 101 rekomendasi. Ini tentunya agar bisa ditindaklanjuti, hal-hal yang sangat prinsip yang kami dapatkan dari beberapa apa namanya, *slide* yang Bapak informasikan ke kami kaitannya dengan kegiatan fisik, belanja barang dan modal, kesesuaian harga, terus kemudian usia perencanaan mungkin yang tidak sesuai sehingga mempengaruhi kualitas konstruksi.

*Nah*, saran saya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengawasan di internal, Pak, sehingga proyek-proyek yang dengan serapan dana yang begitu tinggi ini betul-betul mempunyai usia pakai jangka panjang kualitasnya dan volume. Minggu lalu saya bersepeda dari Kabupaten Banyuwangi ke Situbondo, kebetulan terakhir-terakhir saya senang bersepeda, Pak, jadi kualitas preservasi jalan kita itu sangat rendah sekali, satu bulan atau bahkan dua bulan setelah di apa namanya dilaksanakan itu tingkat kerusakannya tinggi. Terlepas barangkali di sini ada apa namanya intensitas kendaraan-kendaraan yang *ODOL/Over Dimensi Over Load*, maka apabila dibarengi dengan kualitas perencanaan yang baik tentu hal itu bisa akan mengurangi.

Yang berikutnya, Pak Menteri, terkait dengan pagu indikatif PUPR tahun 2024 sebesar 128,15 triliun agar sasarannya lebih diarahkan kepada pencapaian Renstra/rencana strategis Kementerian PUPR 2020 ke 2024, ini kita kurang sudah satu tahun. *Nah*, berdasarkan pengamatan saya kaitannya dengan disampaikan di *leaflet* tadi di pemaparan tadi, ini juga harus disesuaikan dengan keinginan dan bukan hanya keinginan tentu kebutuhan-kebutuhan di daerah. Saya tidak melihat sama sekali ada satu spot, satu titik proyek nasional yang ada di Dapil saya. Contoh misalnya Banyuwangi dengan 120.000 hektar sawah yang merupakan lumbung padi, kebutuhan akan

bandungan juga dibutuhkan di sana, Pak. Memang ada bandungan Bajulmati yang merupakan perbatasan antara Situbondo dengan Banyuwangi, tapi kebutuhannya itu hanya bisa digunakan untuk satu kecamatan saja namanya Kecamatan Wongsorejo dan perlu optimalisasi di situ.

Yang keempat, ini terakhirlah. Bondowoso sekali lagi saya di setiap kesempatan rapat itu selalu bercerita dengan Bondowoso, kenapa Bondowoso? karena secara geografis, Pak Iwan, Dirjen Perumahan mungkin pernah bersekolah di sana, Pak Iwan, ya. Jadi ini perlu afirmasi khusus, Pak. Saya ingin perubahan status jalan, Pak, dari Kabupaten Situbondo menuju Bondowoso sampai ke Jember. Apabila ini status jalannya ini menjadi status jalan nasional maka akselerasi apa namanya pembangunan konstruksi jalannya akan saya kira akan lebih memadai, Pak.

Jadi karena tempatnya terisolir maka cenderung kabupaten ini lambat untuk pertumbuhannya. Banyuwangi berkembang yang tadinya apa namanya juga bersamaan tumbuhnya karena mampu mengakses bagaimana kawah Ijen yang dijadikan kawasan strategis pariwisata nasional kemudian pembangunannya banyak di sana akhirnya seolah-olah kita hanya memindahkan kemiskinan saja kesenjangan saja, dari Bondowoso kita apa, dari Banyuwangi kita pindahkan ke Bondowoso, maka kami menekankan pada kesempatan rapat yang sangat baik ini untuk kiranya permohonan status jalan, perubahan status jalan dari Situbondo menuju Bondowoso, Bondowoso ke Jember. Dan ini sekaligus menjadi jalan alternatif di mana hari ini juga Probolinggo menuju Jember itu sangat padat sekali, karena tol itu hanya berhenti sampai di Besuki, kemarin yang kami tinjau bersama Ka.balai Bina Marga yang ada di Jawa Timur.

Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Dan juga pesan, bukan pesan apa namanya, ucapan terima kasih dari masyarakat di Dapil kaitannya dengan program-program yang telah masuk ke sana, Pak Menteri, betul-betul sangat menyentuh kepada masyarakat, sangat menyentuh kepada usaha peningkatan produksi tanaman pangan karena jalur irigasinya betul-betul sudah tertata dengan baik, Pak. Sekali lagi *maturnuwun*.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

Makasih, Pak Sumail.

Pak Syahrul Aidi.

**F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.C., M.A.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan dan Anggota Komisi V,  
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya,

Tadinya sebetulnya masih banyak yang mau disampaikan, tapi kesepakatan yang penting-penting saja.

Pertama apresiasi tentu untuk kita semua Pak Menteri dan kita, Komisi V dengan lahirnya Undang-Undang Jalan di mana salah satu substansinya adalah terbitnya Inpres untuk jalan daerah. Ini terima kasih yang diucapkan oleh masyarakat Riau diantaranya jalan Bono, Pak. Bono ini adalah destinasi wisata yang cukup unik tetapi belum mendapat perhatian karena infrastruktur jalannya.

Tahun ini *Insyallah* akan dilaksanakan jalan Inpres daerah yang kita usulkan sebanyak 5 kilo, Pak, tapi perlu diketahui sesungguhnya kebutuhannya itu puluhan kilo. Kalau 5 kilo per tahun kayaknya baru selesai 2040-an, gitu. Saya hanya ingin menyampaikan, Pak Menteri, bahwasannya kalau kita lihat data yang ada sesungguhnya jalan yang paling parah yang paling rusak jalan provinsi khususnya itu nomor satu itu Riau kalau untuk provinsi. Kalau kewenangan kabupaten, Riau itu secara keseluruhan kalau tidak salah itu nomor 3 atau nomor 4.

Maksud saya adalah bahwasannya distribusi anggaran jalan daerah yang 32 triliun yang dianggarkan tahun ini yang mungkin juga dianggarkan pada tahun yang akan datang, tentu melihat pada kondisi jalan. Karena kondisi *existing* atau kondisi persentase kemantapan jalan daerah tersebut, tidak didistribusikan merata begitu saja sehingga targetnya bisa tercapai. Apalagi saya selalu dimintai oleh masyarakat Riau itu, Pak Syahrul, tolong sampaikan kepada Pemerintah Pusat bahwasannya dengan kondisi jalan daerah kita yang rusak oleh angkutan sawit angkutan CPO, itu sampai sekarang, Pak, kontribusi pajak CPO itu pada pembangunan jalan kita itu tidak, tidak ada begitu. Dana BDPKS itu sampai sekarang setahu saya belum juga difungsikan untuk pembangunan jalan. Maka kami berharap tentunya Pak Menteri, ada porsi ya yang karena juga datanya banyak, porsi untuk Riau untuk infrastruktur pembangunan jalan daerah ini mohon menjadi perhatian sebagai *feedback* dari kontribusi Riau untuk devisa negara.

Pak Menteri yang saya hormati,

Kemudian hal-hal lain yang kedua ini yang penting juga ingin saya sampaikan, Pak. Begitu juga kebutuhan untuk pembangunan pengaman tebing Sungai, Pak. Saya beberapa kali saya sampaikan, ada 4, 5 sungai yang menjadi kewenangan BWS Riau tetapi selalu didapatkan untuk turap tebingnya itu hanya 5 titik 6 titik, Pak, setiap tahun. Sementara kasusnya itu ratusan, Pak, setiap saya turun ke daerah di tepi-tepi sungai masyarakat yang ada di tepi sungai itu selalu permasalahannya. Kadang kata mereka kenapa harus

dipindahkan kewenangannya ke pusat kalau pusat tidak mampu membangun katanya.

*Nah, jadi mohon, Pak, untuk 2024 mohon juga matriknya kebutuhannya itu distribusi anggaran untuk penahan tebing sungai ini juga melihat kepada kondisi kebutuhan di balai-balai yang ada.*

Barangkali itu, saya persingkat saja.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

Makasih, Pak Syahrul.

Pak Djenri.

**F-PDI PERJUANGAN (DJENRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H.):**

Makasih atas kesempatan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan rapat,  
Pak Menteri PUPR, beserta  
Staf yang ada,

Tentu kami Komisi V menyampaikan selamat atas hasil pemeriksaan BPK sudah berapa kali WTP, cuma memang masih ada catatan. Tapi dari beberapa hari kami rapat di sini evaluasi pelaksanaan di kementerian dan lembaga, respon terhadap temuan-temuan itu kalau prosentasenya dengan anggaran yang begitu besar yang dikelola Kementerian ini responnya Kementerian PUPR ini lebih cepat kalau dibandingkan dengan kementerian atau lembaga yang lain. Tidak heran saya lihat di *Youtube* banyak yang mengaspirasikan Pak Menteri untuk, *nggak* tahu mau jadi calon Wapres atau Presiden belum tahu ya, cuma ini dari Jawa Tengah sudah mau berapa ini mau jadi calon ini, gitu.

Kemudian tadi seiring dengan apa yang disampaikan teman-teman, pengaruh Inpres III itu luar biasa, Pak. Dan saya cukup berbangga karena setiap kali saya ketemu dengan Bapak di ruangan ini saya berteriak terus itu tentang tanggung jawab pemerintah pusat jalan-jalan di daerah dan syukur *alhamdulillah* Pak Presiden merespon itu dengan Inpresnya itu. Mudah-mudahan ini bukan hanya kasus 1, 2 daerah, Pak, kan sudah dibuktikan Pak Presiden ke Lampung setelah pulang kucuran dananya berapa ke sana. Ke Sumatera Utara, Presiden kesana juga mungkin sengaja mereka melewati,

mengantar Presiden di jalan yang rusak. Nanti juga saya kalau Presiden mau resmikan bendungan di Lolak, saya mau pakai jalan yang rusak begitu.

Ya, ini gambaran kecil tapi sebenarnya ini hampir sebagian di Indonesia jalan daerahnya seperti itu, cuma contoh-contoh kecil yang Presiden lewati itu, itulah bagian dari republik ini. Makanya Inpres 3 itu luar biasa, Pak, disamping kami ada anggaran yang kami pakai untuk aspirasi kami di sana mungkin itu masih perlu ditambah, Pak, karena kasuistis kan Presiden kunjungan kemana-mana lewati jalan rusak itu luar biasa dampaknya, karena begitu Inpres 3 terbuka hampir semua bupati, kepala daerah, walikota datang membawa aspirasi mereka, untuk jalan daerah. Ya, kebetulan saya dari PDIP Perjuangan, bupati atau kepala daerah yang tidak sewarna dengan saya datang juga ke saya dan itu harus saya terima karena saya wakil daerah bukan wakil semata-mata wakil partai, *nggak*. Itu yang pertama, Pak.

Kemudian mungkin sebagaimana yang kita percakapkan tadi di tempat makan. Itu program-program padat karya itu perlu sekali, Pamsimas itu luar biasa, daerah-daerah apalagi ini mau menghadapi, BMKG mengatakan akan menghadapi kemarau panjang ya, itu segera diantisipasi ya, Pamsimas itu pokoknya yang padat-padat karya, PISEW, P3TGAI. Cuma mungkin untuk masalah BSPS, Pak, ya di daerah-daerah mungkin berlainan kasus. Kalau justru di daerah kami itu banyak yang menginginkan untuk pengadaan rumah itu bukan hanya sekedar bedah rumah. Tapi orang yang sudah punya lahan tapi belum memiliki rumah sehingga dia harus membangun rumah dari 0 biar tidak bedah rumah lagi atau yang disebut rumah tidak layak huni. Apakah mungkin bisa di 2024 ini lewat aspirasi kami, ada juga program untuk itu dengan persyaratan tentu yang jelas, pertama tentunya hak milik, jelas hak miliknya dia itu. Karena banyak sekali orang sekarang yang tinggal dengan orang tuanya, kontrak atau tempat kos tapi dia punya tanah sebenarnya ya dia punya tanah tapi dia belum mampu untuk membangun tempat tinggalnya di situ. Mungkin itu juga bisa dipikirkan kembali.

Kemudian masalah saya tadi sambung lagi tentang Inpres 3 itu yang tadi dilaksanakan di daerah. Saya heran ya, apakah ini karena sudah ada kontraktor yang iming-iming mau kerja itu atau *nggak*. Kenapa kami hanya bisa dibatasi hanya sampai 5 program untuk aspirasi sekian ratus miliar, cuma boleh 5 paket dan lain sebagainya. Sementara kami sudah sosialisasi waktu reses daerah-daerah kami melihat jalan di desa-desa ini perlu hanya kurang lebih 1 kilometer di desa kan, hanya kurang lebih 2 kilometer, 3 kilometer, sehingga pakatnya sebenarnya jadi banyak. Apakah ini karena kontraktornya bersepakat *nggak* mau kerja yang kecil-kecil begitu atau bagaimana? kami tidak tahu sehingga kami terjebak. Waktu kami reses kami sudah bilang: "*Pak Kepala Desa, jalan rusak di sini kira-kira berapa meter nih dari sini ke sini? Oh, kurang lebih 2 kilometer, oh tolong diukur karena kita akan masukan aspirasi kita yang dari Kementerian PUPR*". Tapi begitu datang balai tidak boleh harus dibatasi hanya sekian paket saja, sehingga 1 paket itu kurang lebih 20 sampai 25 miliar untuk dikerjakan. Kemudian yang paket-paket kecil di desa, di kecamatan gimana? Saya baca di *running text*, Pak Presiden mengatakan tadi pagi, bahwa 2024 dia ini berusaha akan menghapus apa kemiskinan absolut yang ada di

desa untuk 2024. Mudah-mudahan Inpres 3 juga ini sebagiannya juga itu akan mengarahkan ke sana karena banyak desa potensial tapi jalannya rusak total di daerah-daerah.

Mudah-mudahan Pak Menteri, 2024 ini yang adalah tahun politik ya. Sekali lagi garis bawahi program-program padat karya dan tentu Anggota Komisi V ini mengharapkan aspirasinya diperbanyak lagi walaupun Pemilunya Februari, kalau mau masuk pekerjaan, kapan itu mau kerja dan selesainya kapan, sudah selesai nyoblos tanggal 14 programnya baru mau turun. Tapi minimal kami inginkan seperti BPS sudah didaftar dulu, PISEW-nya sudah didaftar, P3TGAI sudah didaftar dan lain sebagainya.

Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Pak Menteri, Pimpinan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

Makasih, Pak Djenri.

Pak Anwar Hafid, Pak Anwar, Pak Anwar.

**F-PD (DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian.

Yang saya hormati dan saya muliakan para Pimpinan dan Anggota Komisi V,

Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajarannya,

Membaca intisari laporan dari evaluasi pelaksanaan APBN 2023 yang disajikan, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan.

Yang pertama, secara umum ada yang pertama itu program kami ingin sampaikan program rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, Pak. Ini mungkin perlu dipikirkan ke depan karena sekarang ini kan mengalami kenaikan harga sampai 6, 5 sampai 6 persen, sementara realisasi saya lihat baru 30%. Apakah ini kita bisa optimis sampai dengan akhir tahun ini bisa mencapai target yang kita inginkan.

Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya alam, Pak... sumber daya air. Saya melihat bahwa pengelolaan kita



pembiayaannya masih sepenuhnya bersumber dari APBN. Padahal sebelumnya sumber daya air ini adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dan sangat penting baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Karena air ini tidak akan semakin bertambah tapi justru akan semakin berkurang dari tahun ke tahun disebabkan karena berbagai faktor tentunya. Oleh karena itu, saya juga ingin menyarankan pada kesempatan ini ke depan, Kementerian PUPR bisa lebih fokus pada upaya pengelolaan sumber daya air di Indonesia ini karena ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kelangsungan segala hal terutama di bidang pertanian yang menjadi ciri khas bangsa kita.

Kemudian yang ketiga, saya melihat beberapa hasil rekomendasi BPK. Tentu saya sangat apresiasi Kementerian PUPR dengan anggaran yang begitu besar, *alhamdulillah* masih dapat memperoleh hasil penilaian BPK dalam catatan laporan keuangan dengan wajar tanpa pengecualian. Cuman ada beberapa hal juga yang perlu kita antisipasi ke depan untuk lebih diminimalisir lagi, masih ada temuan-temuan yang dalam bentuk kerugian negara saya lihat sampai dari tahun ke tahun memang berkurang tapi ini saya kira kita berharap ke depan bisa *zero* temuan khususnya temuan yang bersifat kerugian keuangan negara.

Saya melihat ada satu hal, Pak Menteri, yang perlu juga kita sekalipun ini sebenarnya bukan ranah penuh dari kementerian, soal pengadaan barang dan jasa. Di daerah Pak Menteri, banyak sekali yang kita lihat ya beberapa proyek-proyek terutama saya di Sulawesi Tengah, banyak keluhan. Keluhan itu hampir sebagian bersumber dari proses pengadaan barang dan jasa. Terutama soal penentuan pemenang, kita tahu persis, bahwa sekarang ini kita tidak juga menyalahkan balai lelang tapi ini mungkin harus dicarikan solusi. Contoh dengan seringnya dilakukan pemeriksaan baik BPK termasuk juga KPK maka balai lelang ini biasanya mereka agak sulit juga kalau tidak mengambil standar soal harga terendah. Tapi di lain pihak kita melihat bahwa dalam perjalanannya ternyata harga itu harus dilakukan negosiasi kembali karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk selesainya pekerjaan itu. Dan bahkan ada beberapa kontraktor yang sampaikan teman-teman tadi subkon-subkonnya ada di daerah, Pak Menteri, itu sampai hari ini masih ada yang dibayar terutama dalam pekerjaan pasca bencana di Palu kemarin.

Kemudian yang selanjutnya secara khusus Pak Menteri, saya hanya menyampaikan beberapa aspirasi baik dari pak gubernur, dari para bupati yang ada di Sulawesi Tengah. Yang pertama, termasuk juga dari hasil pengamatan saya penglihatan saya soal jalan nasional yang ada di Sulawesi Tengah. Saya lihat bahwa jalan nasional di Sulawesi Tengah pada umumnya itu 95% dalam kondisi mantap, Pak Menteri, hanya saja kekurangannya masih kurang lebar Pak Menteri, masih ada yang 3 meter, ada yang 4 meter misalnya.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Pak Menteri, jalan poros dari Kota Bungku menuju batas Sulawesi Tenggara itu melewati kawasan industri yang Pak Menteri dulu pernah juga meninjau bersama Pak Presiden. Itu sekarang, Pak Menteri,

karena jalannya itu baru sekitar 3, 4 meter lebarnya, macetnya itu luar biasa kalau setiap hari. Itu viral saya kira itu kita bisa lihat bagaimana susahya jalan yang ada di kawasan industri itu. Saya kira ini menjadi atensi khusus, Pak Menteri, karena ini kawasan industri prioritas nasional yang juga menjadi salah satu kebanggaan Bapak Presiden.

Kemudian yang kedua, yang ingin juga saya sampaikan berkaitan dengan yang berada di dalam kawasan ekonomi khusus, jalan yang ada di kawasan ekonomi khusus Kota Palu, Pak Menteri. Ini kawasan ekonomi khusus Kota Palu ini adalah salah satu kawasan yang menjadi prioritas nasional tapi fasilitas yang ada di dalam kawasan ini memang sangat minim, sehingga perlu ke depan mendapat perhatian.

Kemudian juga dalam kawasan pariwisata. Kita ketahui bahwa di Sulawesi Tengah itu ada salah satu kawasan yang sangat terkenal juga yaitu kawasan wisata Danau Poso, Pak Menteri. Tapi akses untuk ke situ memang sangat masih belum melewati jalan nasional poros Tagolu-Tentena itu, Pak Menteri, masih sangat kecil jalan negaranya.

Kemudian selanjutnya juga di Kota Palu, Pak Menteri, Bu Dirjen juga mungkin bisa dilirik. Ada salah satu kawasan religi yang luar biasa mendapat perhatian dari masyarakat yaitu kawasan wisata religi Sis Aljufri. Di Kota Palu itu ada salah seorang ulama besar dan juga menjadi salah satu tokoh bangsa, mendapatkan bintang Mahaputra Adipradana dari Pemerintah Republik Indonesia dan sekarang proses pengusulan menjadi pahlawan nasional. Dan bahkan Sayyid Idrus bin Salim Aljufri ini adalah salah seorang yang memberi gagasan soal bendera merah putih kepada Presiden Soekarno pada saat itu. Di kawasan ini, Pak, Ibu Dirjen, mungkin perlu dipikirkan karena di sana sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata religi, ini juga sangat-sangat *eh* sangat-sangat potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan religi, wisata religi.

Kemudian selanjutnya, Pak Menteri, kami laporkan juga soal kegiatan Inpres Jalan Daerah. Ini tentu menjadi harapan dan kegembiraan semua masyarakat yang ada di daerah, sangat menaruh perhatian besar, begitu besar keberpihakan Pemerintah, Bapak Presiden dan tentu juga Pak Menteri sendiri. Di Sulawesi Tengah itu, Pak Menteri, ada kurang lebih sekitar 1.400-an kilometer, 1.600-an kilometer jalan provinsi, kondisi 60% rusak berat. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pertimbangan ke depan sehingga Inpres Jalan Daerah ini 2024 akan semakin maksimal. Untuk 2023, *alhamdulillah*, kemarin kepala balai sudah melakukan proses lelang, Pak, untuk tahun 2023 ini.

Kemudian selanjutnya, ada satu hal juga yang menjadi harapan bapak gubernur menyampaikan kepada saya, soal jalan trans Sulawesi jalan nasional yang ada di poros Kebun Kopi, Pak Menteri. Saya ulang-ulang ini kenapa, karena ini jalan yang begitu sudah banyak menelan anggaran yang cukup besar. Tahun 2023 ini lagi, Pak Menteri, kalau tidak salah ada 100 miliar negara mengeluarkan anggaran di situ. Ini hampir setiap tahun tidak berhenti ini, terus menerus dikerjakan. Karena memang kondisi daerah itu yang sangat rawan,

saya kira secara teknis, Pak Menteri dan seluruh jajaran Pak Dirjen lebih mengetahui secara teknis.

Saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, Pak Menteri, ada sebetulnya jalan *bypass* dari Palu menuju Parigi. Itu sudah pernah dirintis oleh pemerintah provinsi bahkan bapak gubernur, Longki Djanggola waktu itu melakukan jalan kaki dua hari dua malam untuk melakukan perintisan langsung jalan ini. Dan pak gubernur sekarang juga menindaklanjuti itu, sudah lengkap semua DED-nya, Pak Menteri, berharap ini bisa menjadi salah satu jalan alternatif ketika jalan nasional Kebun Kopi itu yang setiap saat mengalami kerusakan karena longsor dan sebagainya.

Kemudian yang terakhir, kami juga menyampaikan kepada Pak Menteri pada kesempatan ini bahwa di Sulawesi Tengah itu ada dua kabupaten yang berada di daerah kepulauan yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut. Di dua kabupaten ini, *alhamdulillah*, tahun ini Pak Menteri juga sudah memprogramkan di Kementerian Perhubungan pelabuhan bandar udara di Kabupaten Banggai Laut. Kekurangan kedua daerah ini adalah sarana prasarana air minum, Pak Menteri. Kita tahu persis bahwa di kepulauan ini salah satu persoalannya yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah sarana dan prasarana air minum. Kabupaten Banggai Kepulauan, ini pak bupatinya sampai hari ini kalau tidak salah ada di tempat di sedang melihat kita rapat di sini, Pak Menteri, untuk begitu pentingnya persoalan air minum di kabupatennya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan semua dokumen tentang usulan dari pak gubernur, dari pak bupati, InshaAllah, saya serahkan langsung ke Pak Menteri pada kesempatan ini.

Terima kasih.

*Wallahumusta'an*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

Silakan, Pak. Makasih Pak Anwar walaupun sedikit kepanjangan memang.

Silakan, Pak Eddy, Pak Eddy Santana.

**F-GERINDRA (IR. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan yang saya hormati beserta seluruh Anggota teman-teman di Komisi V,

Menteri PUPR beserta seluruh jajaran, saya kira sampai tingkat direktur ada semuanya di sini,

Saya langsung saja, Pak.

Tadi sudah sedikit saya sampaikan ke Dirjen di ruangan, Jembatan Ampera, Pak. Jembatan Ampera itu *icon* dari Kota Palembang. *Nah*, sudah berapa kali ada pemeliharaan terutama cat-nya, mungkin juga lampu-lampunya, *gitu*. *Nah*, saya terakhir bulan kemarin, Pak, datang langsung dengan kepala balai yang baru, baru sehari beliau itu menjabat, *gitu*. Terus ikut naik dengan lift baru yang dipasang baru, bagus, Pak, tapi memang ya *nggak* bisa lebih besar lagi kita memang kecil itu ya sempit, ya orang 4, orang 5 paling, di atas juga lumayan sudah mulai ditata. Tapi yang saya masalahkan di sini, cat luar itu, Pak, kan saya juga tanya Pak Dirjen, kapan itu terakhir pemeliharaan itu? kalau tidak salah tidak begitu lama, dicat itu ada yang dicat ada yang *nggak*, Pak, kemudian ada kabel-kabel lama itu ngecat itu *nggak* dilepasin, *gitu*.

*Nah*, ini... ini saya menanyakan itu ada stafnya di balai itu sempet nyeletuk juga, Pak, ini catnya nanti buramnya jadi kinclong, berapa saat *gitu* berubah, berubah dari mana saya lihat. Saya bandingkan dengan LRT, Pak, ada balok manjang itu baru, Pak, jadi baru dan memang kinclong sebelahnya kan berdampingan.

*Nah*, ini mohon perhatian Pak Dirjen, itu *icon* jadi kalau perlu ya dianggarkan di cat lagi bagus, sama warnanya, Pak. Jadi warnanya itu ada yang merah, merah itu mati, Pak, warna itu karena buram tadi. Saya pikir *nggak* bisa itu kinclong, Pak, dengan biru dengan biru muda. *Nah*, ini kalau milih warna itu cari arsitek lah *gitu* ya coba gimana warna. Saya waktu itu cocok juga, Pak, jadi merah sama hijau apa *gitu* ya, bagus kena *tuh*. *Nah*, ini *nggak* kena, Pak, *nggak* serasi. Jadi tolong ini diperhatikan, Pak. *Nah*, jadi nanti banyak sekali yang ingin tanya ketika saya di situ masuk Tiktok, Pak, masuk tiktok, ramai, Pak, komentar di situ pada kepengan mau ikut naik, tapi belum selesai itu ada teropong nanti kan jadi semuanya dilengkapi nanti. Saya kira ini, karena ini *icon* mohon betul-betul diperhatikan.

*Nah*, selanjutnya jembatan ini, Pak. Yang jadi pertanyaan masyarakat *kok* ada Jembatan Ampera, Jembatan Musi 1 itu lah itu dulu ada Musi 2 *kok* melompat Musi 4, Musi 5, Musi 6. *Nah*, Musi 4, Musi 6 itu mengapit Jembatan Ampera. Kalau Musi 5 itu yang tol, Pak, kalau kita itu yang di Gandus, Musi 3 mana? Kebetulan saya tahu, Pak, saya ikut menentukan titiknya dengan Pak Hermanto Dardak waktu Dirjen dulu, dia bilang *aja* di manalah yang cocok Musi 3. Itu di dekat melintasi dekat Pulau Kemaro antara Plaju dengan samping Pusri itu, Pak... Pak Basuki pasti tahu *tuh* daerah situ. *Nah*, ini, loh. Jadi kita hiduapkan lagi ini, Pak, jangan sampai ini sudah... saya bilang kenapa langsung melompat Musi 4, Musi 3 itu sudah ada desainnya. Jadi nomenklaturnya sudah... harus Jembatan Musi 3 tapi belum dikerjakan karena mungkin ya inilah yang paling mahal Jembatan Musi 3 paling Panjang, tinggi, desainnya bagus sekali, ada rencana restoran di atasnya di tiangnya, *gitu*. *Nah*, ini... ini kalau kita itu jadi

*icon*, Pak, betul-betul itu, mungkin masih disimpan di arsipnya Pak, Pak Dirjen Bina Marga, Pak. Jadi saya mohon ke depan ini memang penting, Pak. Jadi ini nanti yang jadi lingkaran timurnya Palembang, lingkaran barat ada, lingkaran selatan ada, tinggal lingkaran timur belum ada, Pak, jalan itu yang langsung ke Tanjung Api-Api, Tanjung Carat nanti, lintasannya *nah* ini.

*Nah*, kemudian jalan ke Tanjung Carat, Pak, dari simpang Sungsang ke Tanjung Carat itu 8 kilometer sudah dianggarkan pada waktu Pak Syaiful kepala balainya. Tapi karena Tanjung Carat itu *nggak* ada kejelasannya, dibangun *nggak*, dibangun *nggak* sampai sekarang belum dibangun Pelabuhan Samudera, jadi sepertinya ditarik lagi anggaran itu. *Nah*, padahal dekat situ Inpres Nomor 3 belum keluar, Pak, dekat situ ada jalan provinsi yang ke Sungsang 6 kilometer. *Nah*, saya kira ini mohon ke depan ya masukkan aja, Pak, Inpres, jadi jalan, terima kasih jalan Palembang sampai simpang itu sampai simpang Sungsang sudah bagus, bagus, bagus sekali sudah ada perbaikan, *nah* tinggal dari simpang Sungsang ke Kecamatan Sungsangnya jadi 6 kilometer itu, walaupun ke Tanjung Carat belum. *Nah*, ini *nih* Tanjung Carat, saya dorong juga, Pak, dengan Pak Budi Karya Sumadi, Pak Menteri Perhubungan supaya itu *scheme*-nya dirubah lagi jangan diberikan ke daerah lah, *nggak* mampu, Pak, daerah walaupun itu BUMD ya.

*Nah*, kemudian yang banyak jadi pertanyaan harus saya sampaikan, percepatan penyelesaian jalan tol, Pak. Palembang-Prabumulih sudah dipakai waktu lebaran arus mudik arus balik, tapi kan distop lagi ditutup lagi karena ada yang belum selesai pastinya. *Nah*, ini sangat membantu, Pak, di situ. Kalau sampai Prabumulih cuma sejam dari Palembang, membantu sekali kecepatan yang ramai kan dari Prabumulih, Lahat terus Muara Enim, Lingsgau, *gitu*, *nah* ini. Kemudian Palembang-Betung, Pak, jadi pertanyaan juga Pak ini Pak Bakri apa tadi, Jambi ini *nggak* nyampe-nyampe, Pak, ke Jambi. Ya, kalau Sumsel sudah hebat katanya sudah sampai Palembang, kami belum. Padahal jalan itulah yang banyak wilayah Sumatera Selatannya, Pak, Palembang-Betung-Sungai Lilin-Bayung Lencir sampai perbatasan Jambi, itu wilayah Sumatera Selatan.

*Nah*, kemudian yang jadi cerita juga, Pak, yang menarik dan ini masuk di Tiktok juga ini. Pak Presiden dengan Pak Menteri di jalan Lampung, Pak ya, kan diberikan anggaran, muncullah besoknya, Pak, jalan Kayu Agung-Cengal yang lubangnya sebesar truk, Pak, ya itu jalan provinsi juga, iya, bukan lubang itu, sedan yang Pak Presiden naik itu, saya bisa pastikan, Pak, bisa lewat situ Pak jalan Kayu Agung-Cengal. *Nah*, ini juga mohon perhatian nanti bisa masuk Inpres, daerah pantai timur, Pak. Jadi Palembang keluar tol bisa, tol Kayu Agung, *nah* dari situ Kayu Agung-Cengal, Kayu Agung ke Tulung Selapan, Pak, sampai ada pelabuhan di situ bisa nyebrang ke Pulau Bangka nanti. *Nah*, ini ini alangkah baiknya kalau ini jalan ini menjadi bagus dan itu lintas kita untuk hubungan dengan Pulau Bangka juga.

Saya kira ini, Pimpinan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Makasih, Pak Eddy.

Bu Novita, atau *nggak* mau ngomong lagi Bu Novita sudah cukup?

**F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Eh, gapapa ya, Pak, ya. Jangan tersinggung.  
Terima kasih.

Pimpinan, Anggota, Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati,  
Pak Rahmat Gobel, saya ngelihat senang ditungguin Pak Rahmat Gobel,

Pak Menteri yang pertama apresiasi sama program-programnya. Banyak banget yang sangat membantu kita dari Bina Marga kemudian Cipta Karya kemudian SDA. Aduh, minta maaf saya ini *nggak* bisa minum kopi, minum, jadi jantungnya begini. Ini *nggak* ngerti karena kopi, kopi susu, kopi item atau karena orang penting di sini kumpul jadi jantungnya berdebar kencang, berdebar kencang jadi ingin ngomong. Pak Menteri jadi yang pertama apresiasi sekali karena programnya sangat membantu apalagi kita di Dapil masyarakat, kepada desa itu senang banget sama program kita. *Nggak* usah dijelasin satu-satu, pastinya apa itu namanya mereka itu berharap yang pasti yang pertama terima kasih. Yang kedua, minta lagi yang lebih banyak itu sudah biasa.

Kemudian mengenai WTP. Kita juga apresiasi, Pak, bahwa apa namanya WTP itu terus didapat. Semoga ke depan WTP bisa diperoleh terus. Kemudian apa namanya hanya capaian 22,7 dan 24,9 ini harapannya nanti dalam akhir tahun bisa maksimal dan pastinya *gitu*, walaupun sekarang di bulan Juni ini baru 24,95.

Berikutnya adalah Bina Marga, ini Bina Marga mengenai Undang-Undang Jalan Perpres, Pak Menteri. Ini kan sesuatu yang sangat ditunggu ya apalagi sekarang dipakai dan semuanya pada minta. Cuma memang saya dapat informasi kan seperti yang sudah-sudah bahwa ini hanya bisa diberikan kepada maksimalnya jalan kabupaten, itu betul ya Pak Menteri ya? Iya, makasih.

Cuma itu yang saya ingin sampaikan padahal desa dan ada status jalan yang non-status pun sangat membutuhkan pertolongan, *gitu*. *Nah*, ini kabupaten dengan keterbatasan anggaran, itu apalagi Kementerian Desa juga anggarannya sedikit sangat dibutuhkan intervensi dari undang-undang ini.



Awalnya pengertian saya itu, Undang-Undang Jalan ini bisa diperuntukan untuk seluruh status *gitu*, Pak Menteri, tidak hanya kabupaten tetapi desa dan yang bahkan non-status atau yang mungkin ekstra migrasi juga bisa ditolong. Karena kalau *nggak* diintervensi atau *nggak* ditolong, ini siapa yang nolong, dipikir nanti anak tiri atau anak buangan karena yang diakui adalah jalan kabupaten aja.

Padahal, kalau *nggak* salah saya dapat informasi ini bahwa jalan desa itu sebetulnya juga adalah jalan kabupaten yang ada di desa, kalau *nggak* dibantu siapa yang bantu gitu, karena contohnya *nih* ada jalan desa, saya di jawabin diuruslah statusnya untuk naik ke jalan kabupaten supaya bisa dapat bantuan. Kabupatennya *nggak* mau Nerima, karena kabupatennya bilang kita aja masih kurang. Kalau desa dinaikin, kabupaten nanti makin susah, apalagi yang nasibnya non-status, ini siapa *nih* induknya kan kasihan banget gitu, Pak Menteri.

Jadi, mohon kalau bisa pengertian jalan desa jalan non-status ini bisa masuk ke jalan kabupaten yang ada di desa *gitu* atau menyambungkan sehingga bisa tetap ditolong. Karena contohnya *nih* di kabupaten saya saja di Cilacap, selalu saya sampaikan ini kabupaten terluas di Jawa Tengah dari 35 kabupaten/kota, dari ujung barat perbatasan Jawa Barat sampai perbatasan Banyumas, Kebumen dan seterusnya. Dari ujung sana aja mau ke kabupaten membutuhkan hampir bisa 6 jam dan jalannya rusak parah. Itu, Pak Menteri, saya ingin sampaikan, minta tolong mungkin Perpresnya bisa di apa namanya sedikit dibuka peluang untuk bisa kita mengintervensi jalan desa dan mungkin jalan yang belum berstatus, gitu. Kemudian PR banget, walaupun yang lain sudah luar biasa sekali, tapi PR-PR ini harus disampaikan kepada Pak Menteri.

Kemudian *eh* apa namanya, jembatan, jalan semuanya sudah makasih dari Pak Hedy dan Ka. balai yang baru, saya belum kenal dengan Ka. balai yang baru tapi sudah komunikasi sangat baik. Dan untuk apa namanya, mana lagi ini ya, sabar sabar sebentar. Kemudian apa namanya di Purwokerto, Pak Menteri, ada Unsoed yang minta Rusunawa untuk mahasiswa di sana, ini mungkin tempatnya Pak Iwan ya? minta tolong, Pak Menteri. Dan Unsoed ini adalah universitas negeri di Banyumas. Kemudian dia mau bikin universitas lagi di Cilacap, kampus perikanan dan kelautan. *Nah*, ini minta tolong bisa jadi program di Pak Iwan, Pak Iwan Dirjen, sebentar ya, Pak ya. Minta ke Pak Menteri, entar makin lama *nih* saya.

Kemudian saya juga mau nyampaikan ke Cipta Karya, Pak Menteri, walaupun nanti ada rapat dengan Dirjen-Dirjen kadang-kadang kalau rapat sama Dirjen selalu jawabannya nanti tunggu Pak Menteri *gitu loh*, jadi mumpung ada Pak Menteri, saya sekalian saja. Kemudian Cipta Karya di Cilacap waktu itu ada Pasar Kroya yang terbakar hebat sampai sekarang belum terselesaikan. Apakah ini bisa dibantu untuk pembangunan Pasar Kroya di Kabupaten Cilacap, ini pasar yang termasuk terbesar di sana. Kemudian ada juga situs Srandil di Kabupaten Cilacap ini situs yang paling apa namanya *legend* di selatan, itu namanya Srandil. Ini mungkin nanti bisa saya mengajukan penataan kawasan sana Srandil dan Selok.



Kemudian ada pertanyaan juga untuk Pak Menteri di sini di luar, yang lain saya loncat-loncat, Pak. Tentang tadi ada gedung parkir dan kantin DPR, ini saya mau tanya ini dilaksanakannya kapan? dan kira-kira satu tahun selesai atau tidak? ini tentang pembangunan di DPR. Kemudian tentang... BURT... kemudian tentang pembangunan IKN, Pak, sekalian di sini, saya tanya tentang pembangunan IKN itu gedung DPR dibangunnya itu kapan? apakah sekalian tahun besok atau kapan, gitu? ingin penjelasan karena banyak yang tanya sama saya, jadi saya tanya sama Pak Menteri.

Berikutnya ini *food estate*, Pak, saya pingin tahu karena itu masuk dalam temuan BPK, ini posisinya bagaimana? karena kita juga belum tahu gambaran *food estate* dan pastinya ini adalah sebetulnya tujuannya sangat baik untuk *support* pemerintah.

Berikutnya tentang sumber daya air, terima kasih juga Dirjen Air sudah sangat membantu. Dan di sini saya ingin menyampaikan beberapa, contohnya tentang pengerukan Sungai Jambu di Kabupaten Cilacap dan banjir yang luar biasa di Wanareja. Disini kalau tadi itu Serayu Opak, kalau ini Citanduy, Pak Menteri, di Wanareja kemudian Kawunganten dan Ciraja, ini yang selalu banjir yang besar dan terus menerus.

Itu kira-kira, Pak Menteri.

Terima kasih, nanti lah berikutnya.  
Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pak Menterinya sudah garuk-garuk ini begini, gitu, nanti ngantuk kayaknya, makasih.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Bukan ngantuk, kelamaan, kelamaan.

**F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Saya sukanya yang lama, Pak. Ngomong maksudnya ngomong bicaranya yang lama, kalau pendek kan kurang gitu, kurang lengkap....

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Iya-iya.

**F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Kurang maksimal.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Pak Willem Wandik.

**F-PD (WILLEM WANDIK):**

Baik.

Pak Ketua,  
Bapak-Ibu Anggota Komisi V, dan juga  
Pak Menteri PUPR serta seluruh jajarannya yang kami hormati,

Dari kami pertama terkait evaluasi pelaksanaan APBN 2023 hingga per 4 Juni ini, kami memberikan apresiasi atas kinerja realisasi anggaran dan juga fisik yang seperti yang dipaparkan tadi 22,7 dan juga 24,95. Kiranya prestasi ini terus terjaga hingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut terkait dengan paparan program padat karya, kiranya ditingkatkan terus dan terjaga mengingat saat ini di Indonesia sedang mengalami inflasi dan berdampak pada ketidakstabilan ekonomi di tingkat masyarakat kita terutama ekonomi lemah dan juga sebagai dampak dari ribuan warga kita yang telah dinyatakan kehilangan lapangan kerja dan juga pendapatan.

Dan berikut terkait dengan kepentingan Dapil, itu terkait untuk perumahan itu BPS reguler maupun juga BPS PKE itu sudah ada data kelengkapan yang sudah terverifikasi oleh Balai Papua I apa, namun belum ada persetujuan ya, belum ada persetujuan atau keputusan dari Dirjen Perumahan. Karena itu, kiranya mohon perhatian karena di Dapil kami hanya dari sekian program hanya inilah yang bisa sentuh Dapil kami, BPS, khusus dan juga Rusun.

Dan yang berikut terkait dengan pembahasan hasil pemeriksaan BPK RI, kami juga memberikan ucapan selamat atas penilaian yang telah diperoleh hasil pemeriksaan BPK RI dengan opini WTP, kiranya ini terus dijaga dan terus ditingkatkan.

Dan berikut terkait dengan pembicaraan pendahuluan RKA K/L atau Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 diharapkan supaya kiranya bisa saling, kita bisa saling menjaga, saling menopang, saling mendukung baik dari kami keluarga besar Komisi V maupun mitra. Jangan sampai ada program-program yang masuk *bypass* ke Dapil kami baik Pimpinan maupun komisi melalui Badan apapun yang dibentuk oleh Jakarta baik apakah Badan Percepatan atau Badan Peduli Pembangunan dan lain-lain, tentunya ini harus dijaga karena ini tentu akan dapat mempengaruhi elektabilitas atau elektoral kami di Dapil kami masing-masing. Kalau di luar Dapil kami, itu *monggo*, itu boleh-boleh saja. Tapi khususnya untuk Dapil kami, kiranya, Pak Ketua, ini bisa menjadi perhatian jangan sampai dari Pimpinan atau Anggota ada program-program *bypass* masuk ke sana tapi itu tidak lewat kita dan ini bisa mempengaruhi kehilangan dukungan dari masyarakat terhadap kita di Dapil masing-masing. Kecuali di

apa di luar Dapil Anggota Komisi V yang ada di sini, itu mungkin ya itu dipermonggokan, gitu.

Itu yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.  
Sekian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Nggak ada yang mau diserahkan ke Bapak Menteri, nggak ada? Baik.*

Pak Ilham Pangestu, silakan.

**F-PD (WILLEM WANDIK):**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Iya.

**F-PD (WILLEM WANDIK):**

Interupsi, ada titipan dokumen dari Ketua Sinode Maluku.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Silakan, silakan, ayo, ayo. Ini sepertinya lima pesantrennya saya lihat ini. Makasih Pak Willem.

Pak Ilham Pangestu.

**F-PG (ILHAM PANGESTU):**

Iya, terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang terhormat Pimpinan,  
Pak Menteri beserta jajarannya.

Pertama-tama, saya mewakili Dapil Aceh, masyarakat Aceh merupakan terima kasih atas turunnya Inpres tentang Jalan. Mereka menyambut baik sehingga harapan mereka bisa hasil pertanian dan tempat wisata itu berjalan sesuai dengan harapan. Dan juga saya berterima kasih tentang tahun pada tahun 2024 irigasi di Lhok Guci Jambo Aye selesai, bendungan Krueng Aceh selesai dan diprioritaskan jalan tol Sumatera, Pak, Aceh. Dan beberapa waktu yang lalu saya ada reses di Kecamatan Julok, Desa Naleung, saya melihat

jembatannya begitu rusak, Pak, sehingga mobil saat ini tidak bisa lagi lewat untuk membawa orang meninggal dan orang sakit, Pak Ketua. Ini saya sampaikan mudah-mudahan pada tahun 2024 jembatan di Naleung, Kabupaten Aceh Timur bisa diselesaikan. Saya sudah berkoordinasi kepala daerah kabupaten, kota dan provinsi mereka tidak ada biaya.

Mungkin ini saja, Pimpinan

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

Makasih Pak Ilham.

Pak Fadholi? ada, Pak, tapi Bapak minta yang terakhir katanya.

**F-PDI PERJUANGAN (Ir. SUDJADI):**

Pimpinan yang saya hormati,  
Pak Menteri dan Eselon I,

Saya tidak tanya, hanya menyampaikan tiga pujian. Pujian yang pertama kepada Dirjen Bina Marga, terima kasih, 10 tahun yang saya perjuangkan *flyover* Cangkuk Magelang direalisasi. Yang kedua saya memuji Pak Roberth satu-satunya wakil yang bisa mendatangkan Wakil Ketua.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):**

Pak Roberth, Pak Roberth.

**F-PDI PERJUANGAN (IR. SUDJADI):**

Yang ketiga saya mau mengajukan pantun....

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):**

Sebentar, Pak, sebentar, Pak, itu Pak Roberth *nggak* denger, ini.

**F-PDI PERJUANGAN (IR. SUDJADI):**

Mohon didengarkan semua.

*"Nasi kupat sambal bajak,  
RDP selesai lebih cepat  
tanda Anggota itu bijak".*

Terima kasih

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Makasih, Pak Sudjadi.

Pak Fadholi, silakan, Pak Fadholi.

**F-NASDEM (DRS. FADHOLI, M.I.KOM.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pak Menteri yang saya hormati dan seluruh jajaran,  
Bapak Pimpinan dan Anggota dan Ibu Anggota yang saya hormati,

Yang pertama, tentu menyampaikan terima kasih bagus ini beberapa kerja yang selama ini sudah sangat bagus, cuma saya ada beberapa hal aja, Pak, sebagai satu masukan terkait dengan PISEW. *Nah*, ini program bagus, Pak, jadi kalau bisa PISEW itu besok diperbanyak ini bagus, karena memang kita *nggak* bisa membantu jalan desa tetapi melalui program PISEW nyatanya bisa. Karena kalau kita mengajukan jalan desa melalui Undang-Undang Desa kemarin yang turun kan juga Inpres sehingga kita tidak bisa. *Nah*, oleh karena itu, kalau menurut saya, PISEW ini menjadi bagian yang sangat penting karena kenyataannya bahwa di daerah-daerah itu masih banyak sekali jalan desa yang rusak hingga maka di-*switch* agar program PISEW itu kalau bisa tiga kali lipat dari yang kemarin *gitu*, itu akan lebih bagus, saya pikir itu.

Kemudian yang kedua, saya mengusulkan, ketika di daerah itu ada jembatan yang patah. *Nah*, ini di daerah (*suara kurang jelas*) itu merupakan satu jalan lintas apa antar desa, tapi kalau itu jembatan patah dan kemudian dari Pemkab itu tidak bisa meng-*cover*, mungkin itu menjadi skala prioritas dan menjadi salah satu dispensasi untuk bisa memberikan bantuan itu. Jadi, khususnya jalan yang patah, ini jembatan yang patah ini ternyata masih banyak sehingga beberapa kendala yang dialami di pedesaan itu sangat bagus *eh* sangat terganggu sehingga mereka harus muter, masalah ekonomi *nih* jadi itu.

Terus kemudian juga program *sanitary* ini juga bagus, Pak, ini banyak ini banyak kyai yang mendoakan Pak Menteri, mudah-mudahan jadi Wapres lah. Banyak itu kyai-kyai itu seneng itu sama Pak Basuki itu, luar biasa itu, ini ya kita juga sampaikan ini kan kita hanya wasilah saja ini yang punya anggaran Pak Basuki kan *gitu* sehingga kalau besok itu anggarannya dikurangi yang kena bukan saya, Pak Basuki, *gitu*. *Nah*, termasuk juga ada *nggak* solusi untuk bisa memberikan bukan sekedar Rusun, kan ini Rusun sudah bagus tetapi untuk pondok pesantren itu kan perlu ada satu bantuan yang lebih, ya kecil tapi bisa banyak yang kecil-kecil, kalau Rusun kan besar-besar semua.

Ini kalau bisa karena pasca bantuan itu, *nah*, coba dipikirkan apa yang bisa kita berikan kepada apakah ruang sekolah atau apa untuk pesantren itu

sehingga tidak tergantung di Rusun saja. Katakanlah kalau satu Rusun itu yang mini saja itu 5,5 yang lain misalkan 10 M, itu kalau dipecah untuk pesantren yang kecil-kecil itu yang bisa itu mereka kita kasih bantuan sekitar 300 sampai 500 itu satu paket itu bisa menyelesaikan 10 pesantren atau 20 pesantren. *Nah*, ini semakin banyak yang mendoakan Pak Basuki kan semakin bagus *gitu* loh, jadi itu. Jadi mungkin hal-hal itu yang, kalau yang lainnya saya makmum dan itu program-program yang sangat bagus.

Terima kasih, Pak Menteri.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Makasih, Pak Fadholi.

Bu Sri Wahyuni, ditutup dengan Bu Sri Wahyuni dari Anggota yang terhormat.

**F-NASDEM (SRI WAHYUNI):**

Makasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pak Rachmat Gobel,  
Pak Pimpinan Komisi V,  
Yang saya hormati rekan-rekan dari Komisi V,  
Yang saya hormati juga Pak Menteri beserta seluruh jajaran,

Saya langsung saja dan *nggak* banyak, harusnya kalau penutup ini biasanya waktunya lebih banyak, tapi saya sedikit saja.

Yang pertama, Pak Menteri, kita lama *nggak* bersua ya, Pak, *nggak* bertemu. Tadi sebenarnya Mba Novi protes, orang kita jarang bertemu, jangan tepuk tanganin katanya, *gitu*. Pak Menteri sebagai masukan saja bahwa program padat karya kita yang sedang berjalan ini, saya mohon supaya sistem administrasinya tidak berbelit-belit karena orang desa itu biasanya maunya yang gampang-gampang saja begitu *loh* administrasinya.

Terus yang kedua, di Dapil saya itu jalan nasionalnya yang kanan kiri itu banyak yang belum ada drainasenya sehingga sering menyebabkan banjir dan tentunya banyak jalan yang rusak. Di tempat saya itu sangat luas di Dapil saya itu daerahnya dan kebanyakan daerah pedesaan pegunungan dan saya itu sudah saya datangi semua 307 desa itu, saya tahu persis keadaan jalan di sana sangat-sangat banyak yang rusak. Jadi program PISEW, terus jaringan irigasi itu di sana sangat dibutuhkan, Pak Menteri.

Yang ketiga, saya setuju dengan Pak Fadholi tadi terkait dengan pesantren ya, Pak Menteri, itu kalau bisa diperbanyak. Di Dapil saya itu terutama di Ponorogo itu terkenal dengan kota santri, jadi di sana sangat banyak pondok pesantren dan saya banyak diminta oleh kyai-kyai, ustadz segala macam untuk apa namanya minta program tersebut. Tetapi karena programnya sedikit ya saya minta untuk bersabar menunggu giliran yang selanjutnya.

Saya rasa demikian.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih, Bu Sri.

Dari 25 Anggota yang sempat menyampaikan pandangannya sudah selesai semua, harusnya 29 tapi 4 pulang tidak sempat menyampaikan pandangannya. Dan sebagian sudah menyampaikan pandangan sudah dibahas sebagian semua saya lihat, tinggal beberapa yang tinggal. Sekarang adalah waktu Pimpinan untuk menyampaikan.

Yang pertama Pak Andi Iwan Aras, silakan.

**F-PD (WILLEM WANDIK):**

Pak Ketua, interupsi sedikit.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Oh, masih ada lagi?

**F-PD (WILLEM WANDIK):**

Saya mohon izin sebentar, Pak, sedikit

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Iya, cepat ya, setengah menit.

**F-PD (WILLEM WANDIK):**

Iya, sedikit saja tadi saya lupa, Pak Menteri. Itu jalan Wamena-Mamberamo Tengah-Lanny Jaya-Tolikara-Puncak Jaya itu rusak parah selama berapa tahun terakhir ini. Butuh penanganan ...(rekaman suara kurang jelas)



mungkin apa untuk kelancaran akses transportasi jalan darat karena itu masuk jalan trans nasional. Ya, itu saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Makasih.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):**

Pak.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Silakan.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Saya izin sebentar, Pak.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Silakan, Pak Menteri.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Nanti supaya bisa lama.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Nggak* bisa diwakilkan itu, Pak.

**F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Pimpinan, sambil nunggu, Pak Menteri.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Silakan.

**F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Daripada diem-dieman.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Silakan-silakan.

**F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Saya nambahin satu saja. Titip untuk Cipta Karya, Bu Diana, yang saya WA tentang kepindahan PISEW itu, Bu. Mohon untuk bisa di ACC karena yang lebih membutuhkan tempat yang baru, *gitu*.

Makasih Bu Diana, makasih.

Bang Harvey saja nyanyi.

**F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.C., M.A.):**

Ya, kalau gitu saya izin juga, Ketua.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Silakan, Pak Syahrul.

**F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):**

Langsung ke Bu Dirjen saja. Bu, dulu saya pernah ngusulkan agar PISEW itu tidak diikat dengan peraturan hanya satu titik, satu kecamatan karena ada kasus di kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil, Bu. Jadi memang kebutuhannya itu jalan akses jalan antar desa.

Satu kecamatan itu ada sampai 20 desa, Bu. Kalau menunggu PISEW kapan mereka ini akan bisa selesai? Jadi berharap dibuatlah... jangan dibuat aturannya hanya satu titik, satu kecamatan karena satu kecamatan ada 20 desa ada yang 10 desa begitu, jadi monev saja, Bu, bisa sampai aturannya ke bawah, *gitu*.

**F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):**

Interupsi Pimpinan, sedikit.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Masih ada? Silakan, pendek-pendek ya,

**F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):**

Setengah menit, ini ada amanat.

Pimpinan ada, melalui Pimpinan, saya mau menyampaikan amanat dari masyarakat Situ Asih Pulo, Kecamatan Pancoran Kota Depok. Ucapan terima kasih kepada Menteri PUPR karena sudah melaksanakan rehabilitasi Situ Asih

Pulo, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok arena sebab situ tersebut sudah sangat rawan longsor dan membahayakan warga sekitar. Sekali lagi, Pak Menteri, terima kasih. *Nah*, itu ucapan dari masyarakat harus saya sampaikan, walaupun ini bukan Dapil Kaltim ya.

la

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Makasih, Pak Irwan.

Pak Andi Iwan Aras, silakan Pak Andi Iwan.

**F-GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:**

Terima kasih, Pimpinan.

Itu kalau Pak Menteri pakai *whatsapp* bisa langsung tadi pesannya ke situ, cuma beliau *nggak* pakai *whatsapp*.

Baik.

Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Menteri beserta jajarannya,

Saya singkat, Pak, mengapresiasi dan tentunya mengucapkan terima kasih kepada Bapak secara khusus karena kami meyakini bahwa seluruh Anggota Komisi V mungkin 90% tingkat kepastiannya akan jadi kembali dengan bantuan Bapak yang selama ini Bapak berikan kepada teman-teman.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

*Aamiin, aamiin, aamiin.*

**F-GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Saya langsung, Pak, di Dapil, menyangkut masalah bendungan Jenelata. Terakhir kami mengetahui bahwa prosesnya sudah berjalan untuk pembebasan lahan, tapi untuk pengerjaan fisiknya, saya dengar masih terkendala dari *loan agreement* dengan China. Mudah-mudahan itu bisa segera selesai dan bisa dilaksanakan karena setahu saya sudah setahun, Pak, ya habis lelang dan sudah terikat kontrak. Dan kemudian untuk revitalisasi Danau Tempe, Pak Dirjen, mungkin tahun anggaran ini sudah masuk tinggal optimalisasinya lagi, karena di sana memang ada beberapa pulau-pulau dan memang hampir setiap tahun langganan kita di Kertawajo ini adalah banjir.

Yang kedua, saya lebih banyak ke menyangkut masalah Sarpras olahraga, Pak. Ini saya dapat titipan dari Gubernur NTB untuk bantuan Bapak sudah disertakan pula dari rekomendasi Kemenpora untuk mendapatkan bantuan renovasi stadion utama GOR 17 Desember di NTB yang kurang lebih nilainya mencapai kurang lebih 30 miliar. Semoga dengan *slot* pembangunan rehabilitasi sarana olahraga itu bisa diakomodir di situ.

Kemudian yang ketiga, Pak, yang terakhir sekaligus ini adalah kami mendapat surat dari elemen suporter PSM Makassar (Persatuan Sepakbola Makassar) dari *Red Gank* PSM dan (*suara kurang jelas*) PSM untuk meminta RDPU dengan Komisi V bahkan juga menyurat mungkin ke Kementerian PUPR. Mereka ingin menyampaikan keluhan-keluhan di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar bahwa kesebelasan yang saat ini PSM Makassar ini adalah yang memenangkan Liga (Liga Indonesia) ini ternyata tidak memiliki stadion. Kami di Sulawesi Selatan Stadion Mattoangin ini kemudian kemarin diratakan, Pak, dan udah dua tahun ini tidak ada sarana stadion lagi sehingga PSM Makassar ini berpindah markas ke Kota Pare-Pare, jarak tempuhnya kurang lebih 150 kilometer dari Makassar yang mana akhirnya sudah beberapa yang terjadi yang namanya kecelakaan. *Nah*, ini karena suporter-suporter ini banyak nonton ke apa Kota Pare-Pare, pada saat pulang nontonnya mereka sudah beberapa kejadian yang kemudian itu mengambil korban jiwa.

Jadi, saya ingin menyampaikan ke Pak Menteri, PSM sebagai juara liga nanti akan menghadapi *event-event* internasional yang mewakili Indonesia. Saya kira semoga dari Kementerian PUPR, ada slot anggaran yang bisa membantu pembangunan stadion yang minimal berstandar nasional, tentunya harapannya standar internasional karena *event* internasional nanti akan dilaksanakan di Kota Makassar. Jadi itu saja, Pak, *overall*, kami dari Komisi V semua sudah aman, nyaman. Mudah-mudahan dengan bantuan Pak Menteri selama ini kami di Dapil tetap gagah dan bisa terpilih kembali.

Terima kasih Pak Menteri, semuanya.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Makasih, Pak Andi Iwan.

Pak Roberth Rouw.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Saudara Wakil Ketua DPR RI yang saya hormati Bapak Rachmat Gobel,  
Saudara Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Saya masuk sesuai dengan bahan kita pada siang hari ini yaitu yang pertama evaluasi pelaksanaan APBN 2023 sampai bulan Mei tahun 2023. Yang pertama, melihat pagu anggaran PUPR tahun 2023 awalnya sebesar 125,22 triliun menjadi 140,92 triliun, ada penambahan 5triliun. Saudara Menteri dan semua kita, saya kira kami sangat senang kalau ada penambahan di sini tapi mungkin ada mekanisme yang perlu kita jalani bersama agar penambahan ini pun dibicarakan di komisi supaya kami pun tahu dari mana dan ke mana ini harus penambahan ini dilakukan.

Yang berikut tentang realisasi anggaran per 4 Juni 2023 sebesar 27,70%, saya kira kami memberikan apresiasi dibandingkan dengan tahun 2022 itu ada peningkatan 2,28%... 2,26%. Tapi kami ingin juga memberikan satu koreksi agar ke depan harusnya lebih tinggi menurut kami karena kami semua tahu kami di sini bahwa PUPR sudah melakukan lelang dini, maka ini harusnya lebih banyak. Jadi hampir kita membahas pada waktu itu Saudara Menteri menyampaikan bahwa ini supaya menjaga serapan anggaran dan sebagainya maka PUPR melakukan suatu kebijakan lelang dini yang dilakukan. Maka menurut kami ini mungkin harus lebih banyak lagi, lebih baik lagi peningkatannya.

Yang berikut ya saya kira, yang berikut ini tentang total pagu yang tadi sudah saya sampaikan, tapi saya masuk ke IKN. Kami tahu bahwa IKN total anggaran 2023 itu sebesar 26,67 triliun. Kami ingin penjelasan Pak Saudara Menteri, sejauhmana progres-progres yang dilakukan untuk IKN ini? apakah ini masih *on the track*? dan progres 2023 itu apa saja? Kami di Komisi V yang membawahi itu, kami belum melihat progres-progres seperti apa yang mungkin Pak Menteri harus sampaikan supaya kami juga menyampaikan kepada masyarakat. Karena saya kira ini program IKN adalah salah satu program Bapak Menteri dan khususnya Presiden untuk mewujudkan IKN dan ini menjadi salah satu yang selalu beliau menyampaikan untuk bisa terlaksana sesuai jadwal. Tetapi yang belum kami tahu sesuai jadwal itu, apa saja yang menjadi prioritas untuk pembangunan IKN ini.

Saya kira itu dari 2023, saya ke pembahasan hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2022. Saya berikan apresiasi dengan hasil WTP yang diberikan oleh BPK kepada Kementerian PUPR. Tetapi ada beberapa temuan yang disampaikan dan tadi mungkin Pak Menteri sudah menyampaikan hasil temuan itu sudah ditindaklanjuti oleh beberapa hal. Dan ada 2 poin yang mungkin yang perlu saya sampaikan atas temuan-temuan ini. Yang pertama, itu ada temuan yang sangat besar hampir 1,4 sekian triliun, yaitu tentang penatausahaan Aset Tetap Renovasi atau ATR pada satuan kerja di lingkungan Kementerian PUPR belum sepenuhnya memadai dimana terdapat resiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan resiko duplikasi pencatatan aset oleh entitas lain atas aset tanah sebesar 1,4 sekian triliun dan ini berpotensi menimbulkan konflik di masa mendatang dengan pihak lain atas pengakuan aset.

Yang berikut saya kira ini, ada beberapa temuan yang berulang-ulang dan ini tidak boleh terjadi kalau itu temuan itu berulang-ulang seperti itu. Ini catatan yang diberikan oleh BPK ini, ini saya kira karena Kementerian PUPR adalah mitra kita maka kita minta supaya hal-hal yang menjadi temuan berulang kali ini tidak lagi terjadi di anggaran berikutnya. Jadi itu yang ingin kami sampaikan di 2023 dan evaluasi 2021-2022.

Yang berikut tentang pembicaraan pendahuluan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Saudara Menteri dan seluruh jajaran,

Saya kira di dalam kita bicara pendahuluan ini yang paling penting adalah bagaimana kita menyepakati bersama Pak Menteri agar posisi kita di dalam pembahasan anggaran 2024 itu betul-betul kita ada bersama-sama karena amanat undang-undang yang dibebani kepada kita bahwa kami harus memperjuangkan daerah pemilihan kami, ini penting sekali saya harus sampaikan. Jadi untuk para Dirjen, saya kira mungkin ini harus juga mengerti tentang Undang-Undang MD3, kita yang selalu kami diminta oleh konstituen kami di daerah untuk memberikan program-program kepada daerah kami. Ini yang harus kita bersama-sama maka tolong saya kira dengan adanya Inpres jalan ini, ini kami sangat berterima kasih maka peluang itu sudah ada ya untuk di daerah kami tidak lagi hanya jalan nasional tetapi itu sampai ke jalan kabupaten/kota dan provinsi. Ini peluang yang sangat besar dan itu menjadi dambaan untuk masyarakat di daerah.

Dan saya kira kemarin hasilnya kita sudah lihat bagaimana Presiden hadir ke Lampung dengan Bapak Menteri sekaligus langsung teman-teman di Lampung dapat 800 miliar, sangat besar saya kira. Ini juga harus mesti ada satu keadilan di dalam pemberian program terhadap Inpres ini agar kami di daerah lain pun juga harus mesti bisa dapat. Jangan karena itu viral di Lampung, Lampung langsung dapat 800 miliar ya kan. Dana ini cuma 32 miliar, kita ada 30 sekarang 38 provinsi kalau tidak salah, kalau Lampung sendiri dapat 800 miliar ya yang lain pasti. Jadi maka kita ingin juga bahwa ini kursi ini tolong juga diberikan *space* untuk Anggota Komisi V, pendapat untuk sebagai wujud nyata kami memperjuangkan daerah kami.

Ya, saya kira itu Pak Ridwan sudah tunjuk-tunjuk jam, jadi Pak Ridwan tunjuk jam terus dari tadi. Saya kira yang lain-lain tadi kami sudah selesaikan sama Pak Menteri. Saya cuma ingin satu, Pak Menteri, ini amanat dari sana, kalau teman-teman di Jawa itu banyak pesantren banyak itu besar-besar di sini. Kami di Papua belum ada maka dengan bersatunya dominasi gereja yang ada di Papua, saya kira ini sangat baik dan kemarin Pak Menteri sudah bersama dengan Bapak Wapres selaku Ketua Percepatan Pembangunan di Papua, Bapak Wapres sudah sepakat untuk nanti bersedia memberikan satu lokasi gedung Kristen Center untuk semua dominasi gereja yang ada di sana bersatu disitu untuk bisa bersama pemerintah nanti menjaga kesatuan negara kita ini dan ini sangat baik. Ini proposalnya saya ada bawa.

Yang berikut dengan itu, sekali lagi permohonan para dominasi di sana, mereka dari Papua dan Papua Barat, Papua masih saya anggap satu kesatuan dengan yang DOB baru semuanya itu masih satu, Kristen Center itu adalah menyatukan semuanya ya. Itu mohon rumah khusus untuk di Papua dan Papua Barat itu 100:100 untuk memberikan satu apresiasi kepada para hamba Tuhan yang sudah pensiun nanti. Jadi mereka tidak minta banyak Pak Menteri, cuma 100:100 lahan dari mereka, mereka akan berikan untuk membangun para hamba Tuhan yang akan pensiun-pensiun nanti.

Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, nanti proposalnya saya berikan karena ya terus terang Pak Menteri situasi di Papua, kami tahu. Mudah-



mudahan dengan ini kita bisa karena di sana suara hamba-hamba ini, pelayan Tuhan ini sangat berpengaruh untuk masyarakat di sana. Dengan bisa kita menyatukan mereka dengan satu gedung, dengan bisa melayani juga mereka, mereka sudah melayani rakyat dengan baik. Saya kira mungkin ini peluang yang sangat baik dan itulah kelahiran negara juga kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di sana.

Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

Saya kembalikan ke Pimpinan.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Silakan, Pak Roberth kalau mau serahkan, dengan Pak Andi Iwan, silakan Pak Andi Iwan.

Makasih, Pak Andi Iwan, Pak Roberth Rouw.

Sebelum Pak Wakil Ketua DPR RI, saya juga menyampaikan sedikit, Pak. Saya terima kasih Pelosika mulai muncul tahun 2024 ini, Pak, untuk bendungannya, Pelosika. Cuma barangkali perlu diantisipasi, Pak Dirjen Bina Marga, karena jalanan sana rusak itu, Pak, rusak antara Unaaha dan Pelosika. Kalau memang ada rencana membangun Pelosika tahun 2024 ini berarti jalanan sudah harus diperbaiki dari sekarang, Pak, tapi jalannya jalan provinsi, Pak, jalan provinsi berarti jalan daerah.

Kemudian yang kedua, jalan provinsi itu juga ada rusak itu di Buton Utara kemudian Kolaka Utara kemudian Konsel, tapi nanti rapat dengan Pak Dirjen Bina Marga baru saya sampaikan tentang itu.

Kemudian buat SDA/Sumber Daya Air, di sana itu ada sawah berpotensi 3.000 hektar di Kabupaten Muna namanya. Saya sudah turun di sana dengan Balai BWS, Pak, yang ada di Kendari dan itu diperlukan perencanaan awal dulu, Pak, perencanaan awal karena ada 3.000 hektar di sana. Sementara P3TGAI sudah masuk di sana banyak, baru-baru sempat ribut masyarakatnya karena sukar terbagi airnya, Pak, dengan baik. Oleh karena itu, kalau misalnya ada jalan, Pak, itu Pak Dirjen mungkin perencanaan dari sekarang bisa kalau ada tender perencanaannya bisa turun sekarang sehingga bisa dianggarkan sedikit di tahun 2024.

Hanya itu saja Pak Menteri yang ingin saya sampaikan.

Saya persilakan kepada Pak Rachmat Gobel. Silakan Pak.

**F-NASDEM (RACHMAT GOBEL/WAKIL KETUA DPR RI/KOORDINATOR BIDANG INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN):**

Makasih, Pimpinan.

Pimpinan,  
Pak Menteri dan Para Dirjen,  
Rekan-rekan Komisi V yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala,  
Tuhan Yang Maha Esa,

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera buat kita semuanya,

Pak Menteri, dua atau tiga minggu yang lalu, saya hadir pada rapat koordinasi daerah perbatasan bersama Menteri Dalam Negeri, jadi semua daerah yang berbatasan itu diundang dan memberikan *report*-nya. Saya hadir karena saya sebagai Ketua Pengawasan Daerah Perbatasan, Pak. *Nah*, hasil dari rapat itu saya akan mengadakan rapat koordinasi di tanggal 20, Pak, rencananya. Jadi mohon nanti Bapak berkenan untuk hadir untuk bisa membahas apa yang harus dilakukan. Pada saat itu nanti bukan hanya Bapak saja, tapi kementerian lain pun akan saya undang karena ini bagaimana *mem-follow up* dari apa yang sudah dibangun ataupun yang harus dibangun. Karena waktu saya datang ke Entikong, *kok* sudah bagus isinya *nggak* ada, banyak kegiatan ekonominya berkurang jadi nanti akan mengundang kementerian lainnya yang untuk ke sana. Jadi saya mohon waktunya nanti tanggal 20, Pak, rencananya.

Yang kedua, saya ingin bicara mau minta *support* dari kementerian Bapak, jalan Pelabuhan, Pak, dari ke pelabuhan Gorontalo Utara yang sudah ini. Karena kalau pakai jalan lama, jalan negara itu berbelok-belok sudah bisa membuat truk-truk itu jungkir balik di sana, Pak, sudah beberapa kejadian, Pak, di sana, Pak.

Dan yang ketiga, tentu juga saya ingin minta untuk dukungan dari kementerian untuk merenovasi stadion olahraga, stadion sepakbola maupun olahraga yang ada di Kota Gorontalo yang sudah lama sekali tidak ada perbaikan. Jadi ini perlu ada perbaikan yang saya kira membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.

Yang terakhir, tentu saya sangat ingin terus berkoordinasi dengan kementerian Bapak, bagaimana untuk bisa mensukseskan program rencana pembangunan IKN khususnya dengan negara Jepang yang sudah ada tanda tangan *MoU* ya yang pada waktu itu kunjungan Presiden ke Yokohama pada waktu yang lalu ya. Dan nanti *Insyallah* ini masih akan saya *follow up* untuk menindaklanjuti dari *MoU* yang sudah ditandatangani. Mungkin nanti kalau ada perlu saya akan minta Bu Dirjen mungkin akan ikut dengan saya untuk bagaimana membahas untuk *follow up*-nya mungkin, sekarang lagi sedang dipersiapkan. Gitu saja.

Makasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Makasih, Pak Wakil.

**F-GERINDRA (IR. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Izin Pimpinan, izin. Sebentar saja sedikit saja.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Ya, tolong-tolong sedikit cepat-cepat.

**F-GERINDRA (IR. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Iya, ini saya menyampaikan melalui Pak Menteri untuk Dirjen Cipta Karya sebetulnya, program PISEW. PISEW itu kan program infrastruktur sosial ekonomi wilayah gitu kan, *nah*, ada pengertian yang bias di tempat saya, *gitu*. Jadi mereka itu pokoknya kalau PISEW itu harus buat jalan dari antar desa dari desa ini ke desa itu. *Nah*, ini susah, Bu, kadang-kadang tidak masuk kriteria itu.

Padahal saya pernah baca PISEW itu bisa juga untuk pasar, *gitu* kan, untuk sentra produksi pangan, *gitu* kan. *Nah*, ini, ini mohon disampaikan ke bawah Ibu ya ke balai-balai, kalau PISEW itu bisa ini, ini, ini *loh*, bukan hanya ini. *Nah*, terjadi saya ada yang gagal karena desanya *nggak* mau terima yang sebelah sana karena buat jalan antar desa. Padahal sebelumnya beberapa tahun yang lalu saya buat jembatan perbaikan jembatan antara pasar dan kantor desa, bisa. *Nah*, ini tolong disampaikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Makasih, Pak.

Silakan Pak Roberth masih ada rupanya yang mau disampaikan kembali.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Pak Menteri, ini kemarin yang sesuai kesepakatan kami dengan Pak Sekjen. Kebetulan tiga fraksi sudah siapkan, tapi tadi kami sudah sepakat bahwa nanti yang belum melalui Kapoksi, tapi karena sudah ada kalau saya tidak serahkan Pak Irwan marah itu soalnya dari fraksi tiga yang ada dari.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Dari BSPS ya?

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Iya, dari Fraksi Nasdem, PPP dan Demokrat.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Silakan, silakan Pak, makasih, Pak Roberth.

Sekarang sampailah pada tanggapan Pak Menteri, tapi barangkali begini.

**F-NASDEM (DRS. FADHOLI, M.I.KOM):**

Izin, Pak, sedikit saja.

**F-NASDEM (SRI WAHYUNI):**

Izin, sedikit.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Hah?

**F-NASDEM (DRS. FADHOLI, M.I.KOM):**

Sedikit saja, izin.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Sudah waktunya ini Pak Menteri setengah 4 mau jalan.

**F-NASDEM (DRS. FADHOLI, M.I.KOM):**

Ini penting saya sampaikan terkait Pak Rachmat Gobel.

**F-NASDEM (SRI WAHYUNI):**

Setengah menit.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Tunggu dulu, Pak Fadholi dulu silakan.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Sudah? Bu Sri silakan.

**F-NASDEM (SRI WAHYUNI):**

Iya, izin Pimpinan, mohon maaf.

Pak Menteri saya tadi lupa menyampaikan, saya mohon nanti kelanjutan dari pelebaran jalan di Ponorogo ya yang dari terminal Seloaji tahun ini ke daerah Cekok nanti minta tolong dilanjutkan dari Cekok seterusnya kepada Pak Dirjen ini tolong dicatat. Terus terima kasih untuk program-programnya sudah terlaksana semua.

Demikian.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Terima kasih.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

**F-NASDEM (DRS. FADHOLI, M.I.KOM.):**

Sedikit, Pak, izin, Pak, sedikit saja.

Mengingatkan, dulu Pak Rachmat Gobel kan pernah menyampaikan agar ada alokasi pembangunan MCK di tempat umum, termasuk juga di... tapi saya sekarang ini kan belum pernah direalisasi. Saya masih ingat itu waktu itu Pak Rachmat Gobel menyampaikan di situ kemudian ada para Dirjen, tetapi ketika kita minta ini belum ada solusi. Maka mumpung ini ada Pak Menteri, ada Pak Rachmat Gobel, Pimpinan Komplit ini MCK di tempat umum, Pak. Jadi kayak misalkan ada wisata tapi belum ada MCK-nya kan bisa kita usulkan, pasar misalkan, gitu. Ini penting, Pak, karena MCK itu sangat penting dan ini pahalanya Pak Menteri banyak sekali kalau realisasikan ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Makasih.

Bapak-Ibu yang terhormat,

Bahwa sekarang sampailah kepada tanggapan Menteri PUPR. Cuma bahwa kita karena Pak Menteri ini jam setengah 4 ada urusan penting, kemudian juga kita sebagian sudah pada pulang yang bertanya. Saya sudah konsultasi dengan unsur Pimpinan juga Pak Andi Iwan dan Pak Roberth Rouw. Kita berikan kesempatan saja kepada Pak Menteri lalu jawaban tertulis saja

sehingga sekarang kalau diizinkan kita masuk, iya dia mau jawab secara tertulis atau kita beri kesempatan pada Pak Menteri.

Silakan Pak Menteri.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Terima kasih.

Bapak Pimpinan, Bapak Wakil Ketua DPR yang kami hormati dan dirahmati Allah,

Saya mohon izin saya jawab Bu Novita duluan *nih* Bu, bukan apa-apa ini karena pertanyaannya menyangkut Kantor DPR *gitu*. Kantin dan parkir DPR sudah terkontrak pada bulan Maret 2023 dan *InsyAllah* selesai November ini, sekarang progresnya 2% kontraknya sebesar 55 miliar. Kemudian untuk kantor atau gedung DPR di IKN, kami sudah melakukan sayembara sudah terpilih yang terbaik dari sayembara itu, sekarang sedang ditindaklanjuti dengan detail desainnya. *Nggak... nggak... nggak* saya kira *nggak*.

Kemudian ini akan setelah selesai mudah-mudahan tahun 2024 akan mulai dibangun untuk Gedung DPR nya itu, oke. Kemudian untuk IKN lagi yang dipertanyakan beberapa Bapak-Bapak Anggota DPR, Pak Roberth misalnya atau dengan Pak Gobel tadi. Jadi pembagian tugas kami dengan otorita, kami dari Kementerian PUPR fokusnya adalah membangun *basic infrastructure*. Dari seperti yang tadi ditanyakan sebenarnya sudah kami jelaskan tadi. Untuk apa jalan-jalan baik jalan tol yang dari Balikpapan menuju ke IKN, jalan-jalan logistik, jalan-jalan sekitar IKN, kemudian bendungan, Bapak-Bapak sudah menyaksikan di sana yang mungkin akhir tahun ini akan selesai. Kemudian *intake* Sepaku, embung di kawasan inti pemerintahan dan semua perkantoran kita bangun. Perumahan, sekarang yang sudah selesai adalah perumahan hunian pekerja konstruksi dan sedang di dalam pekerjaan adalah rumah tapak jabatan menteri dan sedang dilelang rumah susun 47 rusun atau apartemen untuk ASN dan Hankam. Jadi semua progresnya untuk tahun 2023 ini dengan anggaran 26,67 triliun progresnya 29%. *InsyAllah* sebagian ke perkantoran dan hunian akan selesai pada Juli 2024 sehingga rencana 17-an di sana akan dapat kita laksanakan.

Kemudian yang juga dipertanyakan adalah, apa yang banyak di apresiasi adalah Inpres Jalan Daerah ini. Saya kira ini adalah hasil Bapak-Bapak sekalian, jadi saya hanya pelaksananya saja. Karena tadi seperti yang disampaikan, ini adalah hasil turunan dari Undang-Undang Jalan yang baru. Kemudian kami waktu dibahas di sidang kabinet, kami mengusulkan adanya Inpres Jalan Daerah ini.

Tapi Ibu-Bapak sekalian, saya ingin juga bertanya pada sebetulnya Pak Eddy Santana ini yang dulu juga pernah jadi Kepala Dinas PU. Kalau kita, apakah kita menangani jalan desa *gitu loh*, Pak. Kan ada 80.000 desa itu, apa

iya kita mampu menangani itu, ya Pak ya, jadi dengan Inpres Jalan Daerah ini kalau jalan desa dimasukkan itu kita ada 80.000 desa. Apa? ada sudah ada dana desa, nanti *overlapping*. Jadi kami masih....

**F-GERINDRA (IR. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Izin Pak. izin Pak.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

*Nah*, ini kan makanya Bapak Santana ini kan Kepala Dinas PU sehingga bisa tau persis kondisinya.

**F-GERINDRA (IR. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):**

Iya, Pak. Mungkin gini, Pak, saya ada usul itu, Pak. Jadi porosnya saja tapi dibantu bahan, mereka gotong royong kayak padat karya juga tapi ada programnya nanti, Pak Menteri lah yang paling tahu itu.

Makasih.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Makanya programnya kalau dari PU dari PISEW tadi, Pak, *nah* itu bisa. Tapi kalau Inpres Jalan Daerah ini untuk menangani jalan, kita hanya nanti hanya ngomong *tok*, karena pasti *nggak* akan ketanganan. *Gitu*, Bu, ini kan pertanyaannya Ibu tadi. Oke.

**F-GERINDRA (HJ. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):**

Boleh *nggak* sedikit? Maksudnya kalau umpamanya tidak menangani semuanya tapi menjadi prioritas kuota berapa *gitu*, Pak Menteri, mungkin jadi sedikit, makasih.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Silakan.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Oke, saya kira saya ingin, mohon maaf, Bu. Sementara ini kami ingin fokus dulu di jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dulu yang rusak. Itu dulu, Ibu, karena anggarannya pun kan sekarang 32,7 yang sekarang 14,6 jadi kita fokus itu dulu. Kalau itu sudah bagus pun, udah saya kira sudah lebih baik, Ibu.



Saya kira itu, terima kasih Ibu. Jadi....

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Interupsi Ketua.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Silakan Pak Roberth.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Pak Menteri, kita bicara yang tadi Bapak yang 2023, 2024 belum ada ya besarannya?

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Kalau 2024 di dalam Inpresnya itu disebutkan bahwa Inpres ini tahun 2022 dan 2024.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

2023 dan 2024?

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Iya, jadi nanti 2024 pasti akan ada anggarannya sendiri.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Tapi nilainya belum ya, Pak, ya?

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Belum, belum, belum.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Oke, baik.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Yang 32,7 ini adalah 2023.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

2023.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Iya. Yang 14,6 ini yang prioritas sekarang ini supaya bisa kita laksanakan.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Baik.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Oke.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Makasih, Pak.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Kemudian kalau yang bendungan Jenelata dan Pelosika bukan *nggak* ada masalah di *loan*-nya, semua sudah terkontrak. Cuma ini mekanisme *loan* China itu begitu Pak, kita kontrak dulu baru mengusulkan apa namanya baru mengusulkan untuk untuk pemanfaatan. Jadi *loan*-nya itu kan gelondongan, jadi kalau kita sudah kontrak baru kita juwelkan di situ gitu, jadi *nggak* ada masalah karena sudah kontrak semua.

Ibu-Bapak sekalian.

Saya kira itu yang mungkin bisa kami jawab secara general dipertanyakan oleh Bapak-Bapak semua. Tadi di dalam disampaikan oleh Pak Ketua dan di meja makan tadi untuk 2024, BPS sekarang kami usulkan 45.000, tadinya kami usulkan ini kan sudah lewat Pileg.

Jadi mungkin anggapan kami mohon maaf, Bapak-Bapak sudah lewat. Tapi ternyata kalau itu nanti bisa dimajukan sampai Oktober seperti usulannya Pak Eddy Santana, masih bermanfaat bagi Bapak-Bapak, kami akan dukung kita naikan oke.

**F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

Pak, sedikit, Pak.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Iya.

**F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

Kaitan dengan Inpres, kita tidak persoalan ini, Pak, tapi kan ini kaitan dengan elektoral juga. Tolong diperhatikan juga di masing-masing itu supaya itu tadi berkeseimbangan, *gitu*, Pak.

Makasih.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Oke, kalau soal anggarannya sebetulnya kami, ini kan kami bersama dengan Bappenas, jadi ada SKB ke saya, Menteri PU dengan Menteri Bappenas untuk *programming*-nya. Jadi yang masuk di dalam 14,6 ini yang sudah ada desainnya yang sudah siap, itu nanti pasti akan kita pertimbangkan tahap keduanya. Kalau misalnya sudah lebih pasti akan kita *consider*, *nggak* mungkin kita ketambahan lebih banyak lagi, pasti yang lain tetap, masih ada yang 99 miliar saja, saya sudah cek provinsi. *Nah*, itu tapi karena kriterianya yang harus segera kita laksanakan Juli ini, sambil itu kita laksanakan kita *programming* lagi, nanti Pak Dirjen Bina Marga akan melihat itu. *Nah*, Bapak-Bapak tadi yang disampaikan di sini, saya minta masuk di dalam program yang kedua tadi termasuk yang. Saya kira itu Bapak, sementara itu Bapak.

Terima kasih semuanya atas perhatian Ibu Bapak sekalian apresiasinya kepada kami. Mohon kita bisa terus bekerja sama dan mudah-mudahan program 2024, 2023 ini bisa menjadi amunisi Bapak-Bapak sekalian dalam membina karir Bapak, karir politik Bapak ke depan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

Demikian penyampaian yang disampaikan Pak Menteri tadi, sekarang kita masuk pada kesimpulan, tolong kesimpulannya di... tolong, *kok* lama sekali. *Ah*, bagus saja ya. operator bisa *nggak*? Saya baca saja ya, baik.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Rabu, 7 Juni 2023

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I tahun 2022. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali, sesuai dengan saran dan masukan Komisi V DPR RI.

2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan capaian serapan APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, dimana capaian per 4 Juni 2023 sebagai berikut: realisasi keuangan 22,70% sementara realisasi fisik adalah 24,95%.

3. Komisi V DPR RI memahami paparan tentang Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 Kementerian PUPR sesuai Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: 287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 hal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 tanggal 10 April 2023, sebagai berikut:

- Pagu kebutuhan Tahun Anggaran 2024 Rp190.743.036.295.000,00; sementara

- Pagu indikatif adalah Rp128.155.744.266.000,00 sehingga *backlog* adalah Rp62.587.292.032.000,00.

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 di DPR RI.

4. Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan program dan kegiatan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Komisi V setuju?

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Setuju.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Pak Menteri, setuju?

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Setuju.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Selanjutnya adalah kita beri kesempatan sambutan penutup dari Pak Menteri PUPR. Silakan, Pak.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Bapak Wakil Ketua DPR RI yang kami hormati,  
Bapak-Bapak Ketua, Pimpinan Komisi V DPR RI, dan  
Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan terhadap Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja yang mudah-mudahan ke depan terus kerja sama ini kita dapat jaga bersama.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

*Walaikumsalam.*

Dengan adanya sambutan penutup dari Pak Menteri PUPR tadi maka seluruh rangkaian acara hari ini kita tutup dengan ucapan *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB)  
(KETOK PALU 3 KALI)**

Jakarta, 7 Juni 2023  
a.n. **KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.**  
NIP. 196912021998032002